



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGARUH KUALITAS PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMUM PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH
SMP/SMA DI KOTA PADANG**

TESIS



**ANDI DEFRIYAN
08206086**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

PENGARUH KUALITAS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENDIDIKAN PADA SEKOLAH SMP/SMA DI KOTA PADANG

Oleh : ANDI DEFRIYAN S.H

Di bawah bimbingan : Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak dan A.Rizal Putera, SEi, M.Si, Ak

RINGKASAN

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan pada SMP/SMA di kota Padang, perlu diadakan dilakukan pembenahan terhadap administratif Pendidikan dengan penyempurnakan berbagai kebijakan pengelolaan manajemen Pendidikan. terutama bagi stakeholders pendidikan di kota Padang. Dengan adanya pelayanan yang prima dapat diwujudkan suatu pendidikan yang bermutu dan berkualitas juga

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh kualitas pengendalian intern terhadap pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan pada sekolah SMP/SMA di kota Padang . Variabel dependent adalah kualitas pengendalian intern ,dan variabel independent adalah standar pelayanan minimum pendidikan.

Sampel penelitian ini adalah para kepala Sekolah dan tata usaha sekolah pada SMP/SMA negeri di kota Padang berjumlah 40 orang responden yang terdiri dari 20 dari SMP dan 20 SMA. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner yang diantarkan langsung kepada responden. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis deskriptif persentase (DP) dan metode analisis regresi untuk masing-masing variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa , praktek yang sehat dalam pelayanan minimum pendidikan dengan indeks presentasi 76,00 %, penempatan guru/pegawai sesuai dengan kompetensinya 76,20 % , standar penyelenggaraan pendidikan usia sekolah 85,40 %, standar proses pembelajaran siswa putus sekolah 90,80 % dan standar kualitas siswa dan guru administratif SMP/SMA 81,40 % . Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh tingkat kualitas pengendalian ,50,00 % - 75,00 % dengan kualifikasi baik ,berarti kualitas pengendalian intern sudah berjalan efektif

Populasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SMP/SMA negeri sebanyak 41 sekolah menengah SMP/SMA dan tidak melibatkan SMP/SMA swasta di kota Padang yang terdiri dari 25 SMP negeri dan 16 SMA negeri masing-masing didistribusikan koefisien 2 eksemplar untuk Kepala Sekolah dan Tata Usaha Sekolah yang melaksanakan kegiatan pengendalian administratif terhadap pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan di kota Padang

Koefisien validitas dikatakan valid apabila nilai koefisiennya $> 0,3640$ (r tabel) dan apabila $< 0,3640$ (r tabel) dapat dikatakan tidak valid untuk jumlah responden 30 orang (Idris 2007 : 8). Dengan kata lain bila nilainya positif atau r hitung $> r$ tabel maka instrumen itu dikatakan valid, dan apabila nilainya negatif atau r hitung $< r$ tabel, maka instrumen itu dikatakan tidak valid. Berdasarkan tabel terlihat variabel Kualitas pengendalian Administratif memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,876, variabel pelaksanaan standar pelayanan minimum sebesar 0,814. Dengan demikian berarti bahwa instrumen penelitian ini semuanya adalah reliabel, sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan data. Data yang telah terkumpul, direncanakan akan dianalisis dengan uji klasik, yaitu Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensial

Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel independen secara bersama-sama Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y), dengan taraf keyakinan 95% dan $\alpha = 5\%$. Dan Uji Statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas

yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y), dengan level of significant = 5%

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh tingkat Kualitas pengendalian administratif pada sekolah SMP/SMA di Kota Padang yaitu antara 50,00 % - 75,00 %. Jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan maka rata-rata tingkat kualitas pengendalian administratif pada SMP/SMA di Kota Padang dalam klasifikasi Baik, ini berarti Kualitas Pengendalian sudah berjalan efektif sebagaimana mestinya. nilai signifikansi untuk variabel kualitas pengendalian administratif sebesar $0,070 > 0,05$ yang berarti bahwa distribusi frekuensi data variabel kualitas pengendalian administratif adalah normal. Untuk variabel pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum diperoleh angka signifikansi sebesar $0,083 > 0,05$ yang berarti bahwa data variabel pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum berdistribusi normal., dilihat nilai konstanta sebesar 41,143, artinya pada kondisi saat ini dengan tingkat kualitas pengendalian administratif konstan, pada Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang menyatakan kecenderungan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum yang meningkat.

Angka R Square (R^2) sebesar 0,267 yang berarti pengaruh variabel terikat (*Independent*) terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (Y) sebesar 26,7 %. Artinya kontribusi Kualitas pengendalian Administratif terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang adalah sebesar 26,7%, sedangkan sisanya sebesar 73,3 % dijelaskan oleh sebab lain-sebab lain diluar model penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ternyata bahwa hipotesis kerja yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara Kualitas Pengendalian Administratif terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan SMP/SMA

Judul Penelitian: Pengaruh Kualitas Pengendalian Intern terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan pada SMP/SMA dikota Padang

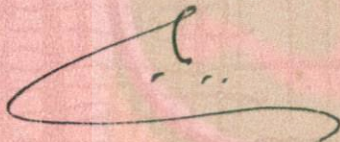
Nama Mahasiswa : ANDI DEFRIYAN

Nomor Pokok : 07 206 086

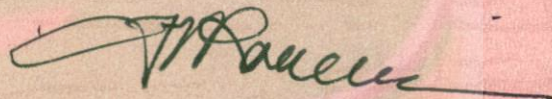
**Program Studi : AKUNTANSI PEMERINTAHAN & PENGAWASAN
KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH**

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan sidang ujian akhir Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Desember 2010

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**



**DR Suhairi, SE, M.Si, Ak
Ketua**



**A. Rizal Putera, SE, M.Si, Ak
Anggota**

**Ketua Program Studi
Akuntansi Pemerintahan**



**Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak
Nip.19640414 199002 2 001**

Direktur Program Pascasarjana



**Prof. Dr. Ir. Novirman Jamarun, M.Sc
Nip.19551106 198003 1 001**

UCAPAN TERIMA KASIH

Padang, 26 Pebruari 2011

Kepada Yth.

Kepala Biro Perencanaan dan

Kerjasama Luar Negeri Depdiknas

di

UNIVERSITAS ANDALAS Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Setjen Depdiknas No. 2872/A2.5/LN/2007 Tanggal 28 September 2007 perihal hasil tes Seleksi Calon Peserta Penerima Beasiswa S-2 dari BPKLN atas nama saya : Andi Defriyan. Dengan ini disampaikan bahwa saya telah menyelesaikan Pendidikan S-2 Program Studi Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara pada Pascasarjana Universitas Andalas atas bantuan dana dari BPKLN tersebut dan dinyatakan lulus dengan predikat kelulusan Memuaskan pada tanggal 10 Desember 2010.

Berkenaan dengan itu melalui surat ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pengelola BPKLN atas semua bantuan yang telah diberikan.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih

Hormat saya

Andi Defriyan

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Tesis yang ditulis dengan judul

**PENGARUH KUALITAS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENDIDIKAN PADA SMP/SMA DIKOTA
PADANG**

Adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan pustaka yang sumber dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya

Padang, Desember 2010

Yang membuat Pernyataan

**Andi Defriyan
07206086**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan hidayahnya hingga Penulis dapat menyusun tesis dengan judul Pengaruh kualitas pengendalian intern terhadap pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan SMP/SMA dikota Padang

Tesis ini yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelas Magister Science pada Program Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara Universitas Andalas Padang

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak DR Suhairi M.Si.Ak dan Arizal Putera SE.M,Si.Ak serta Ketua jurusan Kekhususan Program Akuntansi Pemerintahan DR Yurniwati,SE,M.Si.Ak yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan Tesis ini .Dan juga Kepala Biro luar negeri Depdiknas Republik Indonesia

Padang, 2010

Penulis

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Perumusan masalah.....	9
1.3 Tujuan penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	14
2.2 Penanggung Jawab Ssistem Pengendalian Intern.....	20
2.3 Elemen Sistem Pengendalian Intern.....	21
2.4 Kualitas Sistem Penegendalian Intern.....	22
2.5 Pengertian Satandar Pelayanan Minimum Pendidikan.....	23
2.6 Pengertian Sekolah menengah SMP/SMA.....	27
2.7 Kinerja Sekolah Menengah SMP/SMA di kota Padang.....	28
2.8 Kerangka teoritis.....	29
2.9 Hipotesis.....	32
 B A B III METODE PENELITIAN	
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	35

3.3	Definisi Operasional.....	36
3.4	Data Dan Sumber Data.....	37
3.6	Pengujian Instrumen Penelitian.....	38
3.7	Metode Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Informasi umum kota Padang.....	45
4.1.1	Keadaan Geografis.....	45
4.1.2	Sejarah Kota Padang.....	46
4.1.3	Gambaran umum Pendidikan di kota Padang.....	47
4.1.4	Deskripsi Hasil Penyebaran Kuesioner.....	48
4.1.5	Karakteristik Responden.....	49
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	
4.2.1	Kualitas Pengendalian Administratif (X).....	51
4.2.2	Standar Pelayanan Minimum (Y).....	58
4.3	Deskriptif Persentase (DP) Kualitas Pengendalian administratif.....	64
4.4	Hasil Uji Peryaratan Analisis.....	65
4.5	Hasil Pengujian Hipótesis.....	66
4.6	Pembahasan.....	70

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
--------------	----------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	34
Tabel 3.2 Uji Validitas butir instrumen peneltian.....	39
Tabel 3.3 Uji Realibilitas butir instrumen penelitian.....	41
Tabel 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin.....	49
Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia /Umur.....	50
Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikkan terakhir.....	50
Tabel 4.4 Deskripsi Data Kualitas Penegendalian Administratif.....	53
Tabel 4.5 Deskripsi Data Standar Pelayanan Minimum Pendidikkan.....	60
Tabel 4.6 Indeks Presentase Variabel-veriabel Penelitian.....	64
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data.....	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Homogenitas Data.....	66
Tabel 4.9 Analisis Regresi Kualitas Administrasi terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikkan.....	67
Tabel 4.10 Analis Hasil Uji F.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Kerangka Kerja Teori.....	31
--------	---------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan karena mahalnya biaya yang dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya usulan tentang pendidikan dalam amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) maupun Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan.

Membangun sebuah pendidikan yang bermutu dan berkualitas membutuhkan waktu yang cukup lama dan memakan banyak biaya, namun semua itu akan terbayar jika pendidikan tersebut melahirkan generasi sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga dapat mengalokasikan semua potensi yang dimilikinya untuk memajukan pembangunan khususnya di bidang pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan adanya Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Belum adanya pengaturan

administratif dalam pengelolaan pendidikan yang belum tertata dengan baik seperti menyangkut dengan sumber daya manusia yang mengelolanya, Untuk memenuhi itu perlu adanya *suatu sistem pengawasan*

Sistem pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang P.Siagian). Atau sistem pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Suyanto)

Sedangkan fungsi umum dari suatu sistem pengawasan adalah :

- **Eksplanasi**, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
- **Akuntansi**, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
- **Pemeriksaan**, pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. dan
- **Kepatuhan**, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada sekolah yang dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu tipe sistem pengawasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif adalah sistem pengawasan intern, yaitu pengawasan yg dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tsb. Yang dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*)

Sistem pengendalian intern ini berperan sebagai :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana awal (*planning*) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan).
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pengendalian intern terdiri dari Accounting control dan administratif control . Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.(dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi) Contoh : pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Belum adanya penatausahaan pengelolaan administrasi yang teratur dalam proses penyelenggaraan Pendidikan disekolah menengah SMP/SMA di kota Padang menentukan berbagai langkah-langkah kebijakan untuk pengambilan berbagai keputusan pengelolaan pendidikan perlu adanya pengendalian Intern yang menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu administratif control yang merupakan bagian pengendalian intern dalam pengawasan pelaksanaan proses penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan, untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan peningkatan kualitas pendidikan adanya pengawasan administratif control tersebut mempunyai pengaruh positif dalam pencapaian standar pelayanan minimum pada bidang Pendidikan sangat diperlukan juga ,untuk dapat mengakses kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan Pelaksanaan administratif control itu berjalan dengan baik ,maka semua

stakeholders pendidikan harus dapat bekerjasama bagaimana memberikan suatu pelayanan minimum untuk pendidikan yang berkualitas dalam pengelolaan Pendidikan menengah SMP dan SMA di kota Padang. Sumber daya manusia pengelola pendidikan harus benar-benar memahami, dan meningkatkan kualitas skill/kemampuannya, disiplin bekerja, dan mempunyai tanggung jawab.

Berdasarkan betapa pentingnya administratif control dalam pengelolaan administrasi pendidikan terutama menyangkut aspek manusianya (guru/pegawai) sekolah, maka perlu pengendalian Intern itu diterapkan disekolah, yang berguna untuk mengawasi segala aktifitas kegiatan dalam mengujudkan ketercapaian Pelayanan Minimum Pendidikan untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Pendidikan

Sedangkan fungsi administratif control adalah sebagai berikut

1. Dapat dipercaya sebagai alat analisis untuk peningkatan kualitas pendidikan pada sekolah SMP/SMA
2. Pengawasan dan penelitian yang melihat pada administratif control yang baik mampu melindungi terhadap kelemahan manusia dan mengurangi terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidakberesan yang akan terjadi. Pada setiap kegiatan pada lingkungan sekolah tersebut
3. Tidak praktis apabila akuntan untuk memeriksa secara keseluruhan dengan keterlibatan uang tanpa mempercayai administratif control
4. Kegiatan administratif control berguna untuk pengambilan langkah-langkah dalam menetapkan keputusan yang essential terhadap suatu kebijakan yang

akan diambil pimpinan sekolah untuk menciptakan suatu kualitas pelayanan Pendidikan yang baik kepada masyarakat

5. Kualitas administratif control pada sekolah dilaksanakan sebagai tolok ukur pengujian efectivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, dan Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern dengan administratif control untuk mempertimbangkan aspek biaya- manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Dengan adanya permasalahan dalam proses pengelolaan pendidikan seperti yang telah dijelaskan diatas belum adanya penata administratif yang belum sempurna, maka perlu fungsi administratif control diterapkan untuk melakukan pengawasan intern. agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Dengan pengendalian administratif yang teratur dan baik akan berpengaruh terhadap pencapaian standar pelayanan minimum Pendidikan

Standar pelayanan minimum pendidikan yang merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Seberapa besar tingkat kesesuaian antara pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan standar pelayanan minimum yang harus ada dapat dijadikan indikator untuk mengukur kinerja pendidikan yang pada akhirnya dapat melahirkan program-program pendidikan yang lebih baik

Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan yang memuat target tahunan, rencana

pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan target tahunan pencapaian SPM dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) pemerintah daerah, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) rencana kerja dan anggaran SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah..

Untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan dibutuhkan berbagai komponen penting, antara lain anggaran, sumber daya manusia yang mengelolanya, sarana dan fasilitas pendukung kebutuhan Pendidikan, kurikulum, manajemen pengelolaan Pendidikan.

.Penulis dalam hal ini meneliti dari segi bagaimana pengawasan administratif control yang merupakan bagian dari pengendalian intern dalam pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan .Oleh karena itu harus dikenal dulu apa itu Intenal control ? . kalau dalam Perusahaan pengertiannya yaitu Suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan..

Menurut (AICPA Profesional Standard) Pengendalian Intern Adalah : menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. yang merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.Terdiri dari :. Integritas dan nilai etika. Komitmen terhadap kompetensi Partisipasi dewan komisaris dan komite audit.

Struktur organisas Pemberian wewenang dan tanggungjawab. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Pada instansi pemerintah (sekolah) mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan sesuai dengan PP No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern , yang meliputi 5 unsur yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian.
- d. Informasi dan komunikasi.
- e. Pemantauan

Menurut PP No.60 tahun .2008 yaitu Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern. Perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berkembang mengikuti perubahan lingkungan. Secara

khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja dan kualitas Sistem Pengendalian Intern serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (*mismanagement*). Daftar uji pengendalian intern pemerintah dimaksudkan untuk membantu pimpinan Instansi pemerintah, evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang dan berfungsi serta, jika perlu, untuk membantu menentukan apa, bagian mana, dan bagaimana penyempurnaan dilakukan

Menurut Departemen Pendidikan nasional (Kebijakan Pendidikan 2005) pengalaman menunjukkan, bahwa pelaksanaan penyaluran anggaran dan pertanggung jawab penggunaannya, asset masih rentan, dan banyak yang tidak tepat, dan banyak ditemui penyimpangan, yang disebabkan lemahnya pengendalian intern dari pimpinan dan pelayanan minimum pendidikan yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan belum maksimal sehingga menjadikan lembaga Depdinas kurang mendapatkan kepercayaan dari berbagai masyarakat. Untuk dapat mengatasi hal itu, unsur-unsur yang terkait pada Departemen Pendidikan nasional memerlukan alat manajemen sebagai media pengendali, yaitu pengendalian intern dalam mekanisme operasi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pendidikan, sehingga melekat pada setiap aktivitas yang dijalankan oleh setiap pegawai/guru disekolah yang merupakan ujung tombak pelayanan bagi masyarakat, mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru serta komite sekolah yang perlu dilibatkan untuk membangun

kepercayaan diri-sendiri dan penanaman kompetensi, serta tanggung jawab atas pekerjaan untuk menghasilkan yang terbaik, maka pengendalian intern merupakan suatu yang harus mutlak untuk diwujudkan

Untuk mewujudkan capaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan pada Sekolah SMP/SMA di kota Padang dinilai perlu untuk memperhatikan kualitas administratif control dalam mengaktualisasikan kebijakan-kebijakan pimpinan bagaimana memberikan suatu pelayanan yang terbaik dalam mencapai Pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Semuanya itu tentu terkait dengan stakeholders pendidikan tersebut. Konsep pelayanan Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yaitu berdasarkan yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Kepmendiknas No.129.a/u/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan

Untuk menjamin terimplementasikannya Kepmendiknas tersebut menetapkan bahwa proses pengendalian intern di tingkat satuan pendidikan juga harus sejalan dengan Standar Pelayanan minimum bagi sekolah SMP/SMA. Pada intinya internal control harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terwadahi dalam Komite Sekolah. .

Dengan mengimplementasi administratif control yang berkualitas diharapkan kinerja pelayanan minimum Pendidikan akan terwujud , sehingga dapat dipercaya oleh stakeholders sebagai lembaga yang mampu memberikan Pendidikan yang bermutu dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

Perhatian terhadap eksistensi pelayanan pada bidang Pendidikan perlu mendapat prioritas utama dari pemerintah karena hal ini telah menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Harapan bahwa pemerintah mampu

menunjukkan pelayanan pada bidang Pendidikan secara optimal sekaligus menepis citra negatif tentang pemerintah selama ini. Pemerintah tidak bisa menghindari situasi untuk memenuhi tuntutan pelayanan pendidikan secara transparan pada tingkat saling pengertian. Semakin baik kualitas pelayanan pendidikan, maka semakin tumbuh dan kuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan yang diterima masyarakat maka semakin terkubur dan hilang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hubungan sebab akibat tersebut mulai terlihat pada saat pegawai/guru melaksanakan pekerjaannya yang ditampilkan sebagai sikap dan perilaku dalam bekerja yang merupakan budaya kerja pegawai/guru tersebut.

Pemahaman terhadap Standar Pelayanan Minimum Pendidikan merupakan salah satu unsur yang mampu membantu pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti

“Pengaruh Kualitas pengendalian intern terhadap pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan pada SMP/ SMA di kota Padang “

1.2. Perumusan Masalah

Dari pernyataan tersebut di atas, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kualitas pengendalian intern terhadap capaian Standar pelayanan minimum Pendidikan pada sekolah SMP/SMA di kota Padang

2. *Seberapa besar pengaruh Kualitas pengendalian Intern terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan pada SMP/SMA di kota Padang*

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk mempelajari dan menganalisis berbagai fakta empirik sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh kualitas Pengendalian Intern terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan pada SMP/SMA di kota Padang. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan seberapa besar pengaruh Kualitas Pengendalian Intern terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan pada SMP/SMA di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah menengah SMP/SMA di kota Padang sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan perkembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan minimum sekolah
2. Bagi Sekolah menengah umum SMP/SMA di kota Padang merupakan sebagai sarana efektifitas pengelolaan manajemen dan keuangan yang berorientasi pada sistem pengendalian intern dan pengawasan yang mempunyai tata kelola yang baik

3. Dengan adanya pengawasan administratif yang dilaksanakan berpengaruh positif untuk pengembangan dan kemajuan sekolah untuk peningkatan mutu dan kualitas sekolah
4. Pengendalian administratif membantu kelancaran proses pemberian standar pelayanan minimum pendidikan bagi masyarakat/siswa.
5. Mendorong kinerja Sekolah SMP/SMAdi kota Padang untuk peningkatan kualitas Pendidikan dengan pemberian Standar pelayanan Pendidikan yang terjangkau masyarakat



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah Suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. (Mulyadi 1997 : 165) .Dari pengertian pengendalian intern tersebut di atas, terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut :

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang.
3. Pengendalian intern diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga golongan tujuan yang saling terkait, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Tujuan sistem pengendalian intern yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi.
2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya.
3. Untuk menggalakan efisiensi usaha.
4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan

Menurut The Statement of Auditing Standars bahwa Sistem pengendalian intern terdiri dari rencana organisasi dan semua metode dan cara yang terkordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk mengamankan aktiva-aktivanya dan mengecek ketelitian dan dapat dipercaya data akuntingnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ditaati kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah

Keberhasilan suatu sistem pengendalian ditentukan oleh seberapa jauh sesuai dengan karakteristik organisasi. Pendekatan kontijensi menunjukkan bahwa sistem pengendalian akan lebih dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi apabila desainnya sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Sistem pengendalian yang tidak sesuai dengan karakteristik organisasi dapat menimbulkan perilaku disfungsi bagi anggota organisasi (Pondevile, 2000 dalam Sawitri 2007)

Ikatan Akuntansi Indonesia (2001”319.2) suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan,
(b) efektifitas dan efisiensi operasi dan
(c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Soeseno (2009) menyatakan dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu diharapkan dengan sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Komponen Pengendalian Intern menurut (AICPA Profesional Standard)

- a. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)
- b. Penaksiran Resiko (*Risk Assessment*)
- c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
- d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
- e. Pemantauan (*Monitoring*)

Konsep Sistem pengendalian Intern AICPA ini sangat dibutuhkan. untuk pedoman perancangan sistem Pengendalian Intern Pemerintah, namun proses implementasinya masih pada tahap sosialisasi dan penyiapan pedoman pelaksanaan. Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep sistem pengendalian intern (internal control) yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations dari Treadway Commissions (COSO) pada tahun 1992. Sistem Pengendalian Intern ini terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas (Arens, dkk 2008). sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh aktor dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan

personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan rewiuw pada seluruh tahapan pembangunan.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, para pejabat negara mulai dari menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP (PP N0.60 tahun 2008) tentang sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari unsur-unsur :

a. lingkungan pengendalian;

adalah menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Yang merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Yang terdiri dari :

1. Integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit
4. Struktur organisasi
5. Pemberian wewenang dan tanggungjawab
6. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan

pengendalian merupakan fondasi bagi efektifitas penerapan komponen SPIP lainnya

b. Penilaian risiko

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan pengendalian tersebut adalah

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2. Pembinaan sumber daya manusia;
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. Pengendalian fisik atas aset;
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. Pemisahan fungsi;
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;

11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta

12. Transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan komunikasi

Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Pimpinan instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) PP No.60 Tahun 2008 terdiri atas:

- a. BPKP;
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota

Jadi menurut SPIP PP 60/2008 bahwa Sistem pengendalian intern adalah:

- 1) Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Bab 1 Psl 1 butir 1 PP 60 /2008)
- 2) Sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2 PP No.60/2008

2.2 Penanggung Jawab Sistem Pengendalian Intern

Seluruh *stakeholders* yang terlibat dan sangat berkepentingan dalam pencapaian keberhasilan pengelolaan kegiatan pelaksanaan proses belajar mengajar pada sekolah menengah umum SMP/SMA dikota Padang dalam peningkatan kualitas siswa tenaga guru sarana prasarana ,pembiayaan yang merupakan faktor utama yang harus diperhatikan . Semua *stakeholders* bertanggung jawab atas implementasi pengendalian intern yang memadai pada sekolah menengah umum SMP/SMA tersebut. Namun yang paling bertanggung

jawab pihak internal Sekolah , yaitu : Kepala sekolah sebagai top menejer atau pimpinan yang mengarahkan dan membina para guru-siswa dalam sekolah tersebut

Sedangkan pihak ekstern yang merupakan bagian dari *stakeholdes* terkait langsung dengan fungsi pengendalian intern adalah Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah propinsi/Kab/Kota, Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota, dan unsur pengawasan eksetern diluar Institusi Pendidikan Nasional. seperti BPK, BPKP, Inspektorat Prov/Kab/Kota (PP N0.79 tahun 2005) dan auditor independen (Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pendidikan), bilamana ditemui praktek tidak sehat dalam sistem dan prosedur pengelolaan kegiatan Sekolah menengah SMP/SMA di kota Padang. Auditor independen bertanggung jawab dalam menentukan memadai tidaknya pengendalian intern (Restra Depdiknas 2009)

2.3 Elemen Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (1997:166) unsur pokok sistem pengendalian intern adalah :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi Sistem pengendalian Intern dan fungsi akuntansi pengelolaan dana pada Sekolah SMP/SMA

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan pengelolaan dana pada Sekolah menengah umum SMP/SMA di kota Padang

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Dan prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai realisasi penggunaan dana Sekolah SMP/SMA.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

2.4 Kualitas Pengendalian Intern

Menurut Gaspersz (1997:5) bahwa: "Pada dasarnya kualitas mengacu kepada keistimewaan pokok, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan serta segala sesuatu yang bebas dan kekurangan dan kerusakan" Triguno (1997:76) mendefinisikan kualitas sebagai: "Suatu standar yang harus dicapai oleh seorang, sekelompok, lembaga, organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa". Dan selanjutnya Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani, baik internal maupun eksternal dalam anti optimal pemenuhan atas tuntutan masyarakat".

Kualitas Pengendalian Intern adalah bagaimana sistem ini memberikan pelayanan dalam menciptakan kualitas Pendidikan yang bermutu dalam

pelaksanaan pendidikan menengah SMP/SMA sederajat, dengan memberikan suatu standar pelayanan minimum Pendidikan (SPM) yang dibutuhkan masyarakat (Buku panduan Dirjen Dikdasmen Diknas tentang pendidikan menengah SMP/SMA tahun 2007)

Kualitas Sistem pengendalian intern disini dilihat dari kualitas administrasi control (AICPA Propesional Standard) yaitu *praktek sehat dalam pelayanan Pendidikan dan penempatan para guru dan pegawai sesuai dengan kompetensinya*. Dengan pengaturan seperti itu diharapkan kualitas mutu Pendidikan di kota Padang akan meningkat terutama pada tingkat kelulusan dalam ujian nasional yang dijadikan standar kualitas sekolah. Kualitas administratif control berjalan dengan baik dan sesuai aturan akan memudahkan bagi pimpinan sekolah untuk membina para guru/pegawainya

2.5 Pengertian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan

Adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimum yang wajib dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan kegiatan persekolah dibidang pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu isu sentral dalam pengelolaan pendidikan nasional dewasa ini. Kebutuhan terhadap peningkatan mutu yang bertumpu pada akuntabilitas sekolah. Departemen Pendidikan Nasional juga melakukan penambahan orientasi manajemen persekolahan yang sebelumnya didominasi oleh pusat menjadi manajemen berbasis sekolah atau yang dikenal dengan istilah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Konsep judul didasari oleh pemikiran bahwa

otonomi pendidikan pada akhirnya ada di sekolah. Dengan pemberian kewenangan kepada sekolah diharapkan akan mengakselerasi usaha-usaha yang lebih sistematis terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian sejumlah besar kewenangan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimum yang merupakan tolak ukur yang harus dicapai. Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dalam penerapannya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu baik dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian (PP No.65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM). Pelaksanaan PP ini antara lain dimaksudkan untuk :

1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintah dengan mutu tertentu.
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat dijadikan dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah.

3. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Namun demikian, dalam pemberian Standar Pelayanan Pendidikan mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :129a/U/2004 yang tujuannya untuk menjamin mutu Pendidikan

Semangat standarnisasi itu pula yang tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25/2000. tersebut secara umum menunjukkan kewenangan pemerintah pusat dan propinsi dalam menyusun standarnisasi dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan. Salah satunya adalah penyusunan standar pelayanan minimum. Pasal 2 ayat (4) PP No. 25/2000 menyebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib terlaksanakan oleh kabupaten/kota. Dengan dasar itu, salah satu bentuk standarnisasi yang diperlukan saat ini adalah Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan.yang memuat standar pelayanan kelompok wajib usia sekolah,standar wajib sarana sekolah,kebutuhan guru untuk memenuhi kuato kekurangan guru,buku pegangan siswa,jumlah maksimum siswa dikelas,kualifikasi guru yang mengajar

Setiap sekolah harus bisa memotivasi masyarakat disekitarnya untuk peduli terhadap kemajuan sekolah dalam artian bahwa kemajuan sekolah tidak hanya dibiarkan kepada Kepala Sekolah bersama guru yang mengajar di sekolah tersebut, tapi juga menjadi perhatian dan masukkan dari masyarakat di sekitar sekolah.

Menurut Dahou (2002) ada beberapa ketentuan yang harus diterapkan dalam rangka desentralisasi pendidikan :

1. Peningkatan efektifitas keputusan berkaitan dengan kebijakan pendidikan, baik ditingkat sekolah maupun sistem
2. Ketentuan penggunaan sumber daya lebih efisien
3. Kuantitas dan kualitas pengajaran yang meningkat
4. Pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan sosial dan tenaga kerja dimasa yang akan datang
5. Menghasilkan siswa secara kuantitas dan berkualitas

Indikator Standar Pelayanan Minimum untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah menengah SMP/SMA Sesuai dengan (Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah menengah umum SMP/SMA pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah /Dikdsamen tahun 2007), bahwa SMP/SMA adalah sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian yang dasar minimum yang harus dipenuhi oleh sekolah SMP/SMA. Selanjutnya aspek-aspek SNP tersebut diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan tersebut

Bahwa untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, perlu menetapkan standar pelayanan minimal (SPM)

bidang pendidikan (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129 a/U/2004) yaitu Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. yaitu pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memenuhi dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

2.6 Pengertian Sekolah Menengah umum SMP/SMA

Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen, yang antara satu elemen dengan elemen lainnya saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Sebagai contoh, kepala sekolah adalah salah satu elemen sekolah. Kepala sekolah akan berhubungan secara timbal balik dengan elemen-elemen lain. Terutama dalam pemberian pelayanan Pendidikan bekerjasama dengan komite sekolah. Dalam konteks ini, faktor orangtua dan masyarakat juga memegang peranan yang amat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Orangtua dan masyarakat serta elemen pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan masukan lingkungan yang ikut berpengaruh terhadap kinerja sekolah sebagai suatu sistem (Suparlan, 2005: 61).

. Kinerja sekolah akan dipengaruhi oleh kinerja para guru yang mengajar di sekolah itu. Demikian juga sebaliknya. Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen sebagai berikut: peserta didik (anak didik, siswa) , kepala sekolah , pendidik atau guru Staf tata usaha dan kurikulum serta fasilitas pendidikan lainnya. Adapun Sekolah dengan pendidikan menengah SMP/SMA adalah Suatu Proses pembelajaran untuk tingkat menengah yang merupakan

kelanjutan program wajib belajar 9 tahun yang bertujuan untuk menghasilkan siswa dengan kelulusan yang tingkat pengetahuan dalam tahun untuk persiapan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dengan kurikulum pembelajaran dengan standar nasional yang ditetapkan Depdiknas

2.7 Kinerja Sekolah menengah umum SMP/SMA di kota Padang

Mangkunegara (2000:67) mengemukakan bahwa pengertian kinerja adalah "Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang dibrikan kepadanya"

Adalah merupakan sikap dan perilaku pengelola Kegiatan Sekolah menengah umum SMP/SMA melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan wewenang dan bertanggung jawab masing-masing berdasarkan moral dan etika tidak melanggar hukum dalam mencapai tujuan dari sekolah menengah umum SMP/SMA tersebut (Buku pedoman pengelolahan SMP/SMA Depdiknas tahun 2007). Kinerja Sekolah SMP/SMA tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain prasarana dan sarana yang memadai teknologi informasi/komunikasi, pengolahan kemampuan manajemen, Skill/keahlian, motivasi kerja, kepuasan jabatan (Hidayat dan Surcherly 1986:91)

Kinerja Sekolah menengah umum SMP/SMA akan berhasil apabila Pelaksanaan proses PBM itu secara transparan, akuntabilitas dan bertanggung jawab tidak hanya Pemerintah saja , kepada masyarakat untuk sebagai control sosial yang diutamakan . Dengan ini peran dari masyarakat (komite sekolah) harus

dapat bekerja sama dan bersinergis dengan pihak sekolah untuk mencari sumber keuangan sekolah. Dengan terwujudnya dua komponen dana pendukung Sekolah tersebut, pemerintah dan masyarakat ini, maka tidak sulit untuk mengujudkan suatu keterlaksanaan Standar Pelayanan minimum dalam bidang Pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Masalah pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan dan memberikan standar pelayanan minimum terbaik merupakan ukuran keberhasilan kinerja. Sekolah tersebut

2.8 Kerangka teoritis

Dalam rangka peningkatan kualitas pengendalian intern yang berfokus pada administratif control dalam pengelolaan Pendidikan pada jenjang Pendidikan menengah SMP/SMA yang bertujuan untuk membenahi secara administrasi tata kelola pelayanan pendidikan yang diberikan sekolah dalam mengujudkan mutu pendidikan *disusun standar pelayanan minimum* bidang pendidikan yang merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.

Untuk memenuhi kepentingan semua itu, maka konsekuensinya adalah dengan menyediakan biaya yang cukup tinggi, baik sekolah, komite sekolah, daerah, pusat dan lainnya, dengan pemberian bantuan dana blockgrant dalam bentuk sharing dengan pemerintah daerah tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam jangka waktu tertentu. Semuanya itu diperlukan Sumber daya manusia yang potensial, yang mempunyai skill dan memiliki sikap bertanggung jawab dalam pengelolannya, seperti kualitas guru/pegawai dalam

proses pembelajaran dan penataan administratif sekolah terutama dalam rangka pemberian pelayanan minimum pendidikan yang dapat diakses semua lapisan masyarakat

Pengendalian intern sangat diperlukan dalam mengujudkan Standar pelayanan minimum pendidikan tersebut. Dalam hal *pengendalian administratif* untuk membuat berbagai kebijakan administrasi dalam pemberian pelayanan Pendidikan tersebut misalnya . Penegakan integritas dan nilai etika dalam pemberian pelayanan, komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang, pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif; hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah maupun dengan masyarakat terkait, pengelolaan administratif keuangan sekolah yang teratur, penanaman disiplin kerja aparatur

Namun demikian secara logis, *kemungkinan pengaruh Kualitas sistem pengendalian intern yang memadai diharapkan Sekolah SMP/SMA dapat mengujudkan suatu ketercapaian dalam pelayanan minimum Pendidikan sesuai dengan kemampuannya.* Dalam mengujudkan suatu keberhasilan untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain untuk :

- a. Pencapaian Misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Sekolah, pimpinan sekolah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern tersebut.
- b. Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai

diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus.

Dengan pengaruh kualitas pengendalian administrasi yang memadai berpengaruh pada pencapaian kinerja Pelayanan dalam bidang Pendidikan tentu diharapkan kepada penanggung jawab Pendidikan yaitu Pemerintah dan stakeholders lainnya akan saling bekerjasama, untuk kelancaran pengelolaan sekolah dengan pemanfaatan dana Pendidikan seefisien mungkin, perlu kinerja Sekolah diutamakan dan ditingkatkan untuk mengujudkan Pendidikan yang berkualitas

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa sistem pengendalian intern yang memadai akan berpengaruh terhadap ketercapaian pelayanan minimum Pendidikan bagi peningkatan kinerja Sekolah SMP dan SMA di kota Padang

Berdasarkan kerangka analisis yang telah diungkapkan di atas, maka dapat digambarkan hubungan antar variabel seperti pada gambar berikut :

Gambar 2. Kerangka Kerja Teori



2.10 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah Kualitas Pengendalian Administratif berpengaruh positif dan signifikan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan .



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SMP/SMA negeri sebanyak 41 sekolah menengah SMP/SMA dan tidak melibatkan SMP/SMA swasta di kota Padang yang terdiri dari 25 SMP negeri dan 16 SMA negeri masing-masing didistribusikan koersiner 2 eksemplar untuk Kepala Sekolah dan Tata Usaha Sekolah yang melaksanakan kegiatan pengendalian administratif terhadap pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan di kota Padang

3.2. Sampel

Pengumpulan sampel data penelitian diambil pada Sekolah menengah SMP/SMA negeri di seluruh wilayah kecamatan di kota Padang yakni Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan, Padang Utara, Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Bungus Teluk Kabung, Nanggalo dan Koto Tangah.

Pemilihan sampel ini didasarkan kepada :

1. Sesuai dengan tujuan penelitian yang dilaksanakan
2. Keleluasaan waktu dalam melakukan penelitian
3. Fleksibilitas penulis terhadap responden penulis
4. Penghematan dari segi dana dalam melakukan penelitian

Adapun sampel penelitian terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

N0	Kecamatan	Sekolah	Ket
1	Padang Barat	1. SMPN 01 Padang	
		2. SMPN 01 Padang	
		3. SMPN 03 Padang	
		4. SMAN 01 Padang	
		5. SMAN 02 Padang	
2	Padang Selatan	1. SMPN 20 Padang	
		2. SMPN 35 Padang	
		3. SMAN 06 Padang	
3	Padang Timur	1. SMPN 05 Padang	
		2. SMPN 08 Padang	
		3. SMPN 09 Padang	
4	Padang Utara	1. SMPN 07 Padang	
		2. SMPN 25 Padang	
		3. SMAN 03 Padang	
		3. SMAN 10 Padang	
5	Lubuk Begalung	1. SMPN 11 Padang	
		2. SMPN 17 Padang	
		3. SMPN 33 Padang	
		5. SMAN 04 Padang	
6	Nanggalo	1. SMPN 12 Padang	
		2. SMPN 22 Padang	
		3. SMAN 12 Padang	
7	Koto Tengah	1. SMPN 13 Padang	
		2. SMPN 16 Padang	
		3. SMPN 34 Padang	
		4. SMAN 07 Padang	
		5. SMAN 08 Padang	
		6. SMAN 13 Padang	
8	Kuranji	1. SMPN 10 Padang	
		2. SMPN 18 Padang	
		3. SMPN 28 Padang	
		4. SMAN 05 Padang	
		5. SMAN 16 Padang	
9	Pauh	1. SMPN 15 Padang	
		2. SMAN 09 Padang	
10	Lubuk Kilangan	1. SMPN 21 Padang	
		2. SMAN 14 Padang	
		3. SD 20 Indarung	
11	Bungus Tekab	1. SMPN 19 Padang	
		2. SMAN 11 Padang	

Sumber Diknas Kota Padang

Dari seluruh data yang diperoleh untuk penelitian tersebut, seluruh Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha Sekolah yang bersangkutan dijadikan sebagai sampel penelitian, dengan demikian jumlah sampel penelitian sebanyak 82 sampel yang terdiri yang didistribusikan 50 eksemplar untuk 25 SMP Negeri dan 32 eksemplar untuk 16 SMA Negeri dalam sebelas kecamatan dalam kota Padang, masing-masing sekolah mendapat 2 eksemplar

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni dengan Agustus 2010 dan tempat penelitian dilakukan langsung pada SMP/SMA di kota Padang, kepada seluruh Kepala sekolah dan Kepala Tata Usaha sekolah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya serta kerangka analisis yang disiapkan maka model penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Pendekatan korelasional dilakukan untuk melihat hubungan antar variable berdasarkan fenomena yang teramati di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Irianto (1998;67) menyatakan bahwa penelitian korelasional merupakan penelitian untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, untuk mengetahui besarnya hubungan atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut diperlukan perhitungan dalam bentuk koefisien korelasi.

Penelitian ini merupakan studi Ex Post Facto, karena penelitian ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang melalui data tersebut untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti.

Pendekatan analisisnya adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan tentang adanya satu variabel melalui angka-angka. Jenis statistik yang dipakai adalah inferensial yaitu menggeneralisasikan hasil penelitian yang ada pada sampel bagi populasi.

3.3. Definisi Operasional

Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Indriantoro (2002 : 61) memberikan pengertian tentang definisi variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Sedangkan pengertian definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Indrianto 2002 .69). Variabel dapat diukur dengan berbagai macam nilai tergantung pada construct yang diwakilinya.

Variabel penelitian terdiri dari dua variabel yaitu

- a. variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas pengendalian Intern dengan indikator pengukuran praktek yang sehat dalam Pelayanan Pendidikan dan penempatan guru/pegawai sesuai dengan kompetensinya. (Pedoman pengendalian internal Depdiknas RI tahun 2004).
- b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas, dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Standar Pelayanan Minimum Pendidikan yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. No.129a/U/2004) tanggal 14 oktober 2004 dengan indikator pengukuran standar penyelenggaraan Pendidikan, standar proses pembelajaran bagi siswa putus sekolah, standar kualitas guru

3.4. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah data yang memenuhi unsur- unsur antara lain : objektif, subjektif, sistematis, rasional, oleh sebab itu peneliti disini membagi dua jenis data yaitu :

- Data Primer diperoleh dari hasil survei di lapangan dengan menggunakan metode kuesioner, dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) untuk memperoleh jawaban dan tanggapan dari responden (data yang diperoleh dari studi lapangan dengan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian).
- Data Skunder adalah data yang diperoleh dari/dikumpulkan dari pihak lain yang sehubungan dengan permasalahan penelitian, data skunder umumnya diperoleh dari arsip-arsip lain yang relevan dengan materi pembahasan
- Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan sumber menggunakan beberapa teknik yaitu:

Pertama, Teknik interview (wawancara), wawancara yang dilakukan menggunakan tehnik berbentuk kerucut artinya mulai dari Pucuk Pimpinan unit kerja sampai pelaksana lapangan tentang jenis data sekolah yang dibantu Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk rehab SD/SDLB dan MI di Kota Padang dengan melihat Dokumen.

Kedua, Tehnik Observasi (pengamatan), peneliti disini mengamati langsung beberapa sekolah SMP/SMA Negeri yang menjadi sampel dalam penelitian ini

Ketiga, Tehnik Studi Dokumenter (surat-surat dokumen administrasi, arsip, dan lain-lain) didalam hal ini peneliti mengcopy arsip dan dokumen yang

menyangkut pengendalian administratif dan standar pelayanan minimum pada Dinas Pendidikan kota Padang.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun menggunakan model Skala Likert. Model Skala Likert yang akan digunakan memiliki 5 option pilihan jawaban untuk alat ukur variabel Dana Alokasi Khusus dan Standar Pelayanan Minimum, yaitu terdiri atas :

1. Alternatif jawaban a (Selalu) yang diberi skor nilai 5
2. Alternatif jawaban b (Sering) yang diberi skor nilai 4
3. Alternatif jawaban c (Kadang-Kadang) yang diberi skor nilai 3
4. Alternatif jawaban d (Jarang) yang diberi skor nilai 2
5. Alternatif jawaban e (Tidak Pernah) yang diberi skor nilai 1

3.6. Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dilakukan melalui uji coba kuesioner dilapangan untuk melihat validitas masing-masing item soal berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan ini merupakan uji validitas yang sangat sederhana.

Untuk mengetahui validitas instrumen terhadap item-item pernyataan digunakan rumus Korelasi Product Moment Pearson, yaitu :

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

r = Koefisien Korelasi

x = Tanggapan responden terhadap setiap pernyataan

y = Total tanggapan responden terhadap seluruh pernyataan

n = Jumlah pernyataan

Koefisien validitas dikatakan valid apabila nilai koefisiennya $> 0,3640$ (r tabel) dan apabila $< 0,3640$ (r tabel) dapat dikatakan tidak valid untuk jumlah responden 30 orang (Idris 2007 : 8). Dengan kata lain bila nilainya positif atau r hitung $> r$ tabel maka instrumen itu dikatakan valid, dan apabila nilainya negatif atau r hitung $< r$ tabel, maka instrumen itu dikatakan tidak valid.

Rekapitulasi hasil pengolahan data tersebut sebagaimana terdapat dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.2 Uji Validitas Butir Instrumen Penelitian

N ^o	Variabel	Jumlah Butir	Butir Valid	Butir Gugur
1	Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	17	17	0
2	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	11	11	0

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua butir instrumen yang diujicobakan untuk setiap variabel ternyata semuanya valid, sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan data.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui keandalan dari butir-butir pernyataan instrumen dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas suatu instrumen menggunakan Alfa Cronbach dengan rumus :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right) \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

- r_{11} = Reliabilitas instrumen
- k = Banyaknya butir pernyataan
- σ_t^2 = Varians total
- σ_b^2 = Jumlah varians butir

Arikunto (2002 : 154) menyatakan bahwa Uji reliabilitas adalah suatu uji yang menunjukkan pada pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik/valid. Reliabilitas dapat juga dikatakan adalah suatu uji yang menunjukkan sejauhmana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif, tidak berbeda bila dilakukan pengulangan pengukuran terhadap subjek yang sama dan uji ini hanya dapat dilakukan pada pertanyaan-pertanyaan yang valid saja. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha atau Cronbach's Alpha (r Alpha). Alat pengumpul data dinyatakan handal apabila memiliki koefisien reliabilitas (r Alpha) bertanda positif dan nilainya lebih besar dari nilai r tabel atau nilai r *product moment*.

Hasil analisis reliabilitas dengan koefisien *Alpha Cronbach* menunjukkan nilai r alpha semua variabel bernilai positif, dengan perincian sebagaimana terdapat dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Uji Reliabilitas Butir Instrumen Penelitian Reliabilitas Butir Instrumen Penelitian

No	Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
1	Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,877	Reliabel
2	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	0,813	Reliabel

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat variabel Kualitas pengendalian Administratif memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,876, variabel pelaksanaan standar pelayanan minimum sebesar 0,814. Dengan demikian berarti bahwa instrumen penelitian ini semuanya adalah reliabel, sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan data.

3.7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul, direncanakan akan dianalisis dengan uji klasik, uji tersebut adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk maksud memberikan gambaran tentang kecenderungan data. Analisis deskriptif merupakan bagian dari perhitungan statistik dasar, yakni berkenaan dengan mean, median, standar deviasi, modus, skor maksimum dan skor minimum.

Tingkat pencapaian responden terhadap penyebaran kuisisioner yang dilakukan, maka pada bagian deskripsi ini akan tergambar persentase dan kategori pencapaian responden tersebut. Untuk dilakukan dengan rumus yang dikemukakan oleh Sudjana (1996:335), sebagai berikut :

$$TP = \frac{\text{Skor Rata - rata}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Ket : TP = Tingkat pencapaian responden

Dengan kriteria nilai tingkat pencapaian responden diklasifikasikan sebagai berikut :

Persentase Pencapaian	Kriteria
90 % - 100 %	: Sangat baik
80 % - 89 %	: Baik
65 % - 79 %	: Cukup
55 % - 64 %	: Kurang
0 % - 54 %	: Tidak baik

2. Analisis Inferensial

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan analisis inferensial, berupa regresi sederhana dan korelasi product moment. Analisis Regresi dilakukan bila hubungan dua variabel berupa hubungan kausal atau fungsional.

Sebelum analisis inferensial dilakukan, perlu dilakukan uji persyaratan analisis. Adapun uji persyaratan analisisnya adalah:

a. Uji normalitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah data yang berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas menggunakan Metode Kolmogorow-Smirnov (Idris, 2007 : 81). Kriteria pengujian pada $\alpha = 0,05$, sebagai berikut :

1. Jika nilai Sig. Uji Kolmogorow-Smirnov $> 0,05$ berarti distribusi data sampel dinyatakan normal
2. Jika nilai Sig. Uji Kolmogorow-Smirnov $< 0,05$ berarti distribusi data sampel dinyatakan tidak normal

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berasal dari variansi yang sama (homogen). Uji homogenitas pada prinsipnya bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup data mempunyai variansi yang sama diantara anggota grup. Uji homogenitas menggunakan Uji Levene dengan melihat nilai Sig. Pada tabel *Levene's Test Equality Of Error Variances* dan kriteria pangujian sebagai berikut :

Jika nilai Sig. > 0,05 berarti data penelitian berasal dari variansi yang sama (homogen)

1. Jika nilai Sig. < 0,05 berarti data penelitian berasal dari variansi yang tidak sama (tidak homogen)

c. Uji Linearitas

Uji linearitas untuk mengetahui apakah masing-masing data membentuk garis linear. Pengujian linearitas garis regresi dengan teknik regresi sederhana.

Pengujian hipotesis

- 1) Uji Koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel independen secara bersama-sama dengan humus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{JK_r}{JK_y}$$

Dimana

JK r : Jumlah kuadrat regresi

JK y : Jumlah total kuadrat

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y), dengan taraf keyakinan 95% dan $\alpha = 5\%$.

3) Uji Parsial (Uji t)

Uji Statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y), dengan level of significant = 5%.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Informasi Umum Kota Padang

4.1.1. Keadaan Geografis

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat terletak pada posisi $00^{\circ}44'00''$ - $01^{\circ}08'35''$ Lintang Selatan serta $100^{\circ}05'05''$ dan $100^{\circ}34'09''$ Bujur Timur dan berada di pantai barat pulau Sumatera, dengan luas wilayah darat $694,96 \text{ Km}^2$ dan luas wilayah laut lebih kurang 720 Km^2 , merupakan perpaduan dari wilayah daratan, perbukitan dan aliran sungai, mempunyai panjang pantai $68,126 \text{ Km}^2$ dengan ketinggian rata-rata 4 meter diatas permukaan laut.

Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01% berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Berupa bangunan dan perkarangan seluas $62,88 \text{ Km}^2$ atau 9,05%, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah seluas $52,25 \text{ Km}^2$ atau 7,52%.

Selain daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian pulau Sikuai seluas 48,12 ha dan pulau Toran seluas 33,67 ha. Ketinggian wilayah daratan Kota padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 – 1.853 m diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 Km.

Kedudukan wilayah Kota Padang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

4.1.2. Sejarah Kota Padang

Pada abad ke 14 (1340-1375) Kota Padang dikenal berupa kampung nelayan dengan sebutan Kampung Batung dengan sistem pemerintahan Nagari yang diperintah oleh Penghulu Delapan Suku.

Pada tahun 1667 VOC lewat penghulu terkemuka "Orang Kayo Kaciak" dapat izin mendirikan Loji pertama. Daerah Batang Arau dijadikan sebagai daerah pelabuhan, yang merupakan titik awal pertumbuhan kota Padang. Kota Padang tidak hanya berfungsi sebagai kota pelabuhan tapi juga kota perdagangan. Pelabuhan tersebut terkenal dengan nama Pelabuhan Muaro.

7 Agustus 1669, puncak pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tengah melawan Belanda dengan menguasai Loji-Loji Belanda di Muaro, Padang. Peristiwa tersebut diabadikan sebagai tahun lahir kota Padang.

31 Desember 1799, Seluruh kekuasaan VOC diambil alih pemerintah Belanda dengan membentuk pemerintah kolonial dan Padang dijadikan pusat kedudukan Residen.

1 Maret 1906, Lahir ordonansi yang menetapkan Padang sebagai daerah Cremente (STAL 1906 No.151) yang berlaku 1 April 1906.

9 Maret 1950, Padang dikembalikan ke tangan RI yang merupakan negara bagian melalui SK. Presiden RI Serikat (RIS), No.111 tanggal 9 Maret 1950.

15 Agustus 1950, SK. Gubernur Sumatera Tengah No. 65/GP-50, tanggal 15 Agustus 1950 menetapkan Pemerintahan Kota Padang sebagai suatu daerah otonom sementara menunggu penetapannya sesuai UU No. 225 tahun 1948. Saat itu kota Padang diperluas, kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Walikota Padang.

29 Mei 1958, SK. Gubernur Sumatera Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958 secara de facto menetapkan kota Padang menjadi ibukota propinsi Sumatera Barat.

Tahun 1975, Secara de jure Padang menjadi ibukota Sumatera Barat, yang ditandai dengan keluarnya UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dengan Kotamadya Padang dijadikan daerah otonom dan wilayah administratif yang dikepalai oleh seorang Walikota.

4.1.3. Gambaran Umum Pendidikan SMP/SMA dikota Padang

Pengelolaan Pendidikan menengah umum di kota Padang satuan pendidikan memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab yang sangat strategis dan jauh lebih luas di bandingkan masa sebelumnya. Sekolah dituntut untuk lebih mandiri, lebih mampu membangun hubungan kemitraan dengan dan memperkuat partisipasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), bersikap lebih terbuka dan akuntabel. Pemberian pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat untuk menerima pendidikan yang berkualitas .Pemerintah kota Padang telah berusaha menganggarkan untuk pendidikan lebih kurang 15 % dari APBD kota Padang ,namun demikian masih kurang dari amanat Undang-undang Dasar 1945 yang memasukan 20 % untuk Pendidikan .Untuk itu fungsi pengawasan dalam hal ini sangat diperlukan terutama untuk aparatur pendidikan tersebut, dan dalam hal ini pengendalian intern sangat dibutuhkan.Di kota

Padang terdapat jumlah sekolah setingkat SMP sebanyak 37 negeri dan 25 swasta, dan SMA 16 negeri dan 27 swasta yang semuanya berkiprah untuk kemajuan kota Padang

Kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada sekolah pada gilirannya menuntut setiap sekolah mereformasi dirinya. Setiap sekolah harus beralih dari budaya dan manajemen yang bersifat “menunggu dan bertindak sesuai kebijakan atas” yang bersifat konvensional kepada sebuah budaya dan manajemen baru yang menempatkan hasil telaah diri sebagai titik awal usaha pengembangan, kemandirian

4.1.4 Deskripsi Hasil Penyebaran Kuesioner

Untuk melihat bagaimana pengaruh kualitas pengendalian intern terhadap pencapaian Standar pelayanan minimum Pendidikan SMP/SMA di kota Padang Penulis menyebarkan kuesioner kepada responden para Kepala Sekolah dan tata usaha sekolah, kuesioner disebarkan sebanyak 82 eksemplar yang terdiri dari 25 SMP Negeri dan 16 SMA Negeri yang telah melaksanakan pengendalian intern terhadap jajaran sekolah tersebut, hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Keseluruhan kuesioner yang disebarkan	82
2	Kuesioner yang dikembalikan	82
3	Respon rate	100%
4	Kuesioner yang tidak kembali	-
5	Kuisisioner kembali tetapi data tidak lengkap	-
6	Total kuesioner yang layak dianalisis	82

Sumber : Data Primer

4.1.5. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pengalaman kerja sebagai Kepala Sekolah dan tata usaha Sekolah. Dalam kuisioner responden tidak perlu mencantumkan identitas pribadi atau nama untuk kerahasiaan informasi yang diberikan responden. Untuk lebih jelasnya dari masing-masing karakteristik responden tersebut diatas, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari jenis kelaminnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	71	90
2	Perempuan	11	10
	Jumlah	82	100

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan data dalam Tabel 4.2 tersebut di atas, tampak bahwa dari 82 orang responden, 71 orang (90%) di antaranya adalah responden laki-laki, sedangkan 11 (69%) lainnya adalah responden perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, komposisi responden penelitian ini sebagian besar didominasi oleh responden laki-laki

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia/ Umur

Karakteristik responden berdasarkan usia/ umur, dapat dilihat dari Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia/ Umur

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	20 thn – 30 thn	7	7,1
2	31 thn – 40 thn	16	16,7
3	41 thn – 50 thn	41	50,0
4	> 51 thn	18	26,2
	Jumlah	82	100

Sumber : data primer diolah

Dari tabel yang disajikan dalam Tabel 4.3 di atas bahwa, dari 42 orang responden 7 orang (7,1%) di antaranya berusia antara 20 – 30 tahun, 16 orang (16,7%) di antaranya berusia antara 31 – 40 tahun, 18 orang (26,2%) di antaranya berusia lebih dari 51 tahun dan 41 orang (50%) diantaranya berusia antara 41 – 50 tahun.

Berdasarkan karakteristik usia/ umur responden tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian didominasi oleh responden yang berusia antara 41 – 50 tahun.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dibedakan atas 4 kriteria, dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SLTA/ Sederajat	8	9,7
2	DI – DIII	3	3,6
3	S1/ A IV	32	39
4	S2 keatas	40	48,7
	Jumlah	82	100

Sumber : data primer diolah

Dari tabel yang disajikan dalam Tabel 4.4 di atas nampak bahwa, dari 82 orang responden 3 orang (3,6%) diantaranya memiliki pendidikan Diploma (D. III-IV),

3 orang (3,6) memiliki pendidikan tertinggi SLTA/ sederajat, 8 orang (9,7%) memiliki pendidikan terakhir S2 keatas dan sebanyak 40 orang (48,7%) memiliki pendidikan terakhir S1/ A IV. sebanyak 32 orang (39%)

Mengacu pada karakteristik pendidikan terakhir tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan tertinggi S2.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Kualitas Pengendalian Administratif (X)

Di Kota Padang jumlah sekolah SMP negeri sebanyak 37 sekolah dan pada jenjang SMA negeri sebanyak 16 sekolah, penerapan pengendalian administratif cukup memberikan perubahan untuk peningkatan kualitas Pendidikan. Sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik untuk mendorong dilakukannya efisiensi untuk dipatuhi kebijakan menejemen. Penerapan kualitas pengendalian intern terletak pada kualitas administratif control dalam mengaktualisasikan kebijakan-kebijakan pimpinan bagaimana memberikan suatu pelayanan yang terbaik dalam mencapai Pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Semuanya itu tentu terkait dengan stakeholders pendidikan tersebut. Pembinaan administrasi dalam pengelolaan pendidikan terutama sumber daya manusia para guru/pegawai yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat /siswa sekolah. Fungsi pengawasan diberlakukan dengan secara berkala terhadap semua pelaksanaan kegiatan secara administratif suai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku

Kegiatan pengawasan pengendalian intern dilaksanakan secara berkala tiap bulan untuk memantau perkembangan pengendalian administrasi Pendidikan pada

sekolah tersebut. Peran pengawas sekolah sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan arahan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan .

Untuk itu dapat dilihat tabel 4.4 tentang Kualitas pengendalian Administratif berikut ini



No	Indikator	Kriteria Pernyataan										Rata-Rata Skor	TC (%)	Ket
		SS		S		RG		TS		STS				
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
1	Kedisiplinan guru/pegawai dalam menaati peraturan sekolah	35	42.7	30	36.6	15	18.3	2	2.4	0	0.0	4.19	83.90	Baik
2	Ketaatan guru/pegawai terhadap perintah organisasi atau atasan	32	39.0	27	32.9	21	25.6	2	2.4	0	0.0	4.08	81.71	Baik
3	Kemampuan guru/pegawai menaati jam kerja	31	37.8	17	20.7	30	36.6	4	4.9	0	0.0	3.91	78.29	Cukup Baik
4	Kesanggupan pegawai /guru dalam memberi pelayanan publik	35	42.7	10	12.2	34	41.5	3	3.7	0	0.0	3.93	78.78	Cukup Baik
5	Kepedulian aparaturnya terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan	40	48.8	7	8.5	33	40.2	2	2.4	0	0.0	4.03	80.73	Baik
6	Kemampuan bekerjasama dengan sesama instansi terkait dalam bekerja	40	48.8	20	24.4	22	26.8	0	0.00	0	0.0	4.21	84.39	Baik
7	Kepedulian dan kejujuran guru/pegawai sekolah memberikan pelayanan kepada masyarakat	34	41.5	28	34.1	20	24.4	0	0.00	0	0.0	4.17	83.41	Baik
8	Kemampuan aparaturnya cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat	41	50.0	21	25.6	17	20.7	3	3.7	0	0.0	4.21	84.39	Baik
9	Penyelesaian tugas sesuai dengan rencana program dan waktu	43	52.4	13	15.9	24	29.3	2	2.4	0	0.0	4.18	83.66	Baik
10	Dedikasi dalam mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat	43	52.4	17	20.7	22	26.8	0	0.0	0	0.0	4.25	85.12	Baik
11	Memberikan pendidikan yang murah dan berkualitas	42	51.2	21	25.6	16	19.5	3	3.7	0	0.0	4.24	84.88	Baik
12	Memberikan terobosan dalam memacu kualitas/memotivasi siswa dalam meningkatkan semangat belajar	61	74.4	17	20.7	4	4.9	0	0.0	0	0.0	4.69	93.90	Sangat Baik
13	Kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak sekolah dalam pelayanan pendidikan	63	76.8	13	15.9	2	2.4	4	4.9	0	0.0	4.64	92.93	Sangat Baik
14	Penempatan guru sesuai dengan skill dan kompetensi ditetapkan oleh Dinas Pendidikan	47	57.3	19	23.2	9	11.0	6	7.3	1	1.2	4.28	85.61	Baik
15	Peningkatan SDM guru memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi telah tercapai	6	7.3	2	2.4	14	17.1	9	11.0	51	62.2	1.81	36.34	Tidak Baik
16	Pemberian pelatihan workshop bagi guru belum dilaksanakan dengan baik	2	2.4	3	3.7	13	15.9	12	14.6	52	63.4	1.67	33.41	Tidak Baik
17	Pengembangan program kompetensi guru belum berjalan maksimal	2	2.4	2	2.4	12	14.6	15	18.3	51	62.2	1.64	32.93	Tidak Baik
	Rara-rata Total	667	40.80	272	16.64	331	20.24	161	9.85	204	12.48	3.71	74.2	Cukup Baik

Deskripsi Data Kualitas pengendalian administratif (X)

Sumber: Data Primer, 2010 (diolah sendiri)

Berdasarkan dari hasil pengolahan data dapat dijelaskan masing-masing sub variabel bahwa :

A. Praktek yang sehat dalam pelayanan Pendidikan ,pihak sekolah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat dengan standar pelayanan minimum yang terbaik .Dimulai pada komponen sekolah yaitu Kepala Sekolah,guru/pegawai,komite sekolah dan stakeholders yang bertanggung jawab pada bidang Pendidikan di kota Padang.Untuk menciptakan kualitas sistem pengendalian interen dalam pemberian pelayanan pendidikan tersebut.Pihak sekolah menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan administaratif dalam menata menejemen sekolah antara lain disiplin terhadap guru dan pegawai,pengembangan kemampuan/skill guru,penyempurnaan kurikulum,pembekalan ilmu pengetahuan/teknologi kepada siswa yang lebih lengkap,pengembangan sarana/prasarana sekolah,memperbaiki menejemen sekolah,meningkatkan peranan komite sekolah untuk mmenunjang kinerja sekolah,dan membuat hubungan sinergis dengan instansi pemerintah/swasta yang peduli pendidikan.Beberapa terobosan untuk pemberian pelayanan yang sehat dalam bidang Pendidikan jenjang menengah SMP/SMA di kota Padang tersebut cukup efektif ,terutama telah dapat mengakses masyarakat berbagai lapisan untuk menikmati Pendidikan murah dan berkualitas tersebut

Kualitas pengendalian adiministratif terhadap pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan pada Sekolah menengah SMP/SMA dikota Padang, sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen, yang antara satu elemen dengan elemen lainnya saling berkaitan dan saling pengaruh

mempengaruhi. Sebagai contoh, kepala sekolah adalah salah satu elemen sekolah. Kepala sekolah akan berhubungan secara timbal balik dengan elemen-elemen lain di sekolah itu. Kinerja sekolah akan dipengaruhi oleh kinerja para guru yang mengajar di sekolah itu. Demikian juga sebaliknya. Kinerja sekolah ditentukan oleh kinerja semua elemen sekolah. Keberhasilan sekolah tidak ditentukan oleh kinerja kepala sekolah saja, juga bukan oleh kinerja pendidikannya saja, atau juga bukan karena gedungnya yang megah, juga bukan karena fasilitasnya yang lengkap, melainkan oleh sinergi yang dibangun dari semua elemen sekolah.

B. Penempatan guru sesuai dengan kompetensinya

Adanya pengendalian administratif yang telah berjalan pada sekolah SMP/SMA di kota Padang memudahkan bagi pimpinan untuk melakukan penjenjangan karier, peningkatan kualitas dan kompetensi guru/pegawai serta mempunyai komitmen terhadap kompetensi yang langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pimpinan sekolah mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing guru sesuai dengan bidang studi yang diajarnya.
2. Pimpinan sekolah menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi guru tersebut
3. Pimpinan sekolah menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu Penempatan guru sesuai dengan kompetensinya ,dengan adminisratif control guru/pegawai dapat dilihat skill /kemampuannya dan ditempatkan sesuai dengan kecakapannya.

Hasil jawaban responden terhadap sub variabel tersebut dapat dilihat dari jawaban koesiner yang mempunyai 13 item pertanyaan dibawah ini

Dalam Kedipsilinan guru/pegawai dalam menaati peraturan sekolah (42,7%) dikategorikan baik karena adanya aturan dari sekolah adanya sangsi dan reward dan punishmen

Sementara dalam ketaatan guru/pegawai terhadap perintah organisasi atau atasan (39%) dengan arti kata pembinaan terhadap kualitas guru cukup baik, dan berfungsinya administratif control dengan penegakan disiplin.

Selanjutnya dalam menaati jam kerja bagi guru/pegawai cukup baik (37,8) dikarenakan guru/pegawai telah memahami kewajibannya dan pimpinan telah mdenerapkan administratif control disekolahnya dan dalam pelaksanaannya masih dikategorikan cukup baik.

Seterusnya dari kesanggupan guru/pegawai dalam memberikan pelayanan pendidikan dengan persentase sebesar (42,7%), hal ini dikarenakan telah memulai jaringan kerjasama yang baik dengan masyarakat.

Kepedulian aparatur sekolah terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan direspon sebanyak 48,8%

Kemampuan kerjasama dengan sesama instansi terkait dalam bekerja (48,8%.) ini cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi

Kemudian kepedulian dan kejujuran guru/pegawai sekolah memberikan pelayanan kepada masyarakat persentase sebanyak (41,5%) berarti guru dan pegawai mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara

Kemudian kemampuan aparaturnya sekolah cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat sebesar 52,4% ini dikarenakan kualitas pelayanan administratif sekolah yang teratur dan baik.

Sementara untuk penyelesaian tugas sesuai dengan rencana program dan waktu yaitu 52,4% ini dikarenakan program sekolah telah berjalan sebagaimana mestinya dan perlu ditingkatkan lagi.

Kemudian dedikasi dalam mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat sebesar 51,2% berarti guru/pegawai telah memahami betapa pentingnya pekerjaannya untuk memberikan yang terbaik-kebaikannya kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan

Seterusnya dalam memberikan pendidikan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat persentase sebesar 74,4%.berarti pelayanan yang diberikan sekolah dengan berbagai kemudahan bagi masyarakat cukup efektif

Kemudian memberikan terobosan dalam memacu kualitas/memotifasi siswa 76,8% dengan kata lain program kerja dan proses kualitas administrasi dan PBM sekolah cukup baik dan memacu semangat siswa untuk belajar.

Selanjutnya kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi Kondisi dengan pihak sekolah dalam pelayanan pendidikan dengan persentase jawaban responden 57,3% dikategorikan baik ini berarti sekolah telah membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat,dengan pelayanan prima untuk kepentingan pendidikan.

Penempatan guru sesuai dengan skill dan kompetensinya yang dimiliki ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebesar 62,2% ini berarti kualitas guru telah diakui kualifikasi dan kemampuannya.

Pengembangan potensi guru belum berjalan maksimaln 3,4% dan ini berarti.guru telah belum menguasai materi kurikulum pembelajaran yang diberikan kesiswa

Selanjutnya berdasarkan skor rata-rata dan tingkat capaian skor maksimum setiap indikator variabel kualitas pengendalian intern di atas, dapat diungkapkan bahwa distribusi jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju menerapkan penegndalian intern secara maksimal, hal ini mengingat sekolah yang sangat membutuhkan pelayanan yang maksimal untuk peningkatan kualitas Pendidikkan yang diberikan kepada masyarakat.. Dengan demikian maka secara umum kualitas pengendalian Intern pada SMP/SMA di kota Padang termasuk dalam kategori cukup baik dengan tingkat capaian responden sebesar 74,20%

4.2.2 Standar Pelayanan Minimum (Y)

Standar Pelayanan Minimum Pendidikan dikota Padang telah memberikan pelayanan yang prima memacu kualitas Pendidikkan ,dengan administratif control yang cukup baik,dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikkan nasional/Kepmendiknas No.129 a/U/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikkan di Indonesia. Yaitu terjaminnya masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dalam bidang Pendidikkan mulai dari Pendidikkan Dasar Menengah,Kejuruan,Pendidikkan Non formal,Standar Pendidikkan Pemuda dan Olahraga

Kewenangan penyelenggaraan Pendidikkan Penyelenggaraan satuan pendidikan luar biasa (pendidikan khusus)menjadi Wewenang Pemerintah Provinsi. Penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk Pendidikkan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi wewenang pemerintah kabupaten/Kota. Pemerintah provinsi

dan kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan standar pelayanan pendidikan minimal.. Standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi jenis pelayanan standar usia wajib sekolah,SD,SMP dan SMA,standar siswa putus sekolah dengan tingkat persentase 1% dari siswa sekolah aktif,standar sarana prasarana sekolah terpenuhi sekitar 90 % sesuai standar nasional ,100 % siswa telah mempunyai buku paket wajib sekolah. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya. Jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 30 - 40 siswa.. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai " memuaskan" dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS di kelas I dan II. 70 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke sekolah Menengah umum(SMU) hingga mencapai indikator kinerja minimal

Bentuk-bentuk standar pelayanan minimum pendidikan lainnya yang diberikan sekolah antara lain

- a) Memberikan Pendidikan gratis bagi siswa SMP
- b) Kemudahan biaya Pendidikan bagi siswa yang tidak mampu
- c) Buku pegangan gratis bagi siswa SMP
- d) Memberikan pengetahuan agama yang lengkap dengan kegiatan pesantren ramadhan
- e) Memberikan pendidikan life skill bagi siswa
- f) Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pihak sekolah
- g) Mengsosialisasikan kegiatan Pendidikan sekolah kepada masyarakat secara transparan

Hasil jawaban responden tentang Standar Pelayanan Minimum pada pendidikan dasar di Kota Padang dapat dilihat pada frekwensi skor pada tabel 4.5 berikut ini :

Deskripsi data Standar Pelayanan Minimum Pendidikan (Y)

No	Indikator	Kriteria Pernyataan										Rata-Rata Skor	TC (%)	Ket
		SS		S		RG		TS		STS				
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
1	90 % anak dalam kelomok usia 13-15 thn bersekolah pada SMP,dan usia 16-18 thn bersekolah pada SMA	67	81.7	15	18.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.82	96.40	Sangat Baik
2	Materi Pengajaran yang disajikan mengacu pada kurikulum yang relevan	69	84.1	12	14.6	1	1.2	0	0.0	0	0.0	4.83	96.60	Sangat Baik
3	Strategi belajar mengajar yang diterapkan disesuaikan dengan materi pelajaran	66	80.5	15	18.3	1	1.2	0	0.0	0	0.0	4.79	95.80	Sangat Baik
4	Angka putus sekolah melebihi 1 % dari jumlah siswa sekolah	55	67.1	11	13.4	4	4.9	1	1.2	11	13.4	4.20	84.00	Baik
5	Bimbingan belajar bagi siswa putus sekolah dengan sistem paket siswa putus sekolah	59	72.0	20	24.4	2	2.4	1	1.2	0	0.0	4.67	93.40	Sangat Baik
6	Daya tampung sekolah bagi anak usia sekolah melebihi kapasitas yang ruang belajar	16	19.5	8	9.8	21	25.6	13	15.9	24	29.3	2.74	54.80	Kurang Baik
7	Persyaratan sebagai siswa melingkupi pada kemampuan ekonomi orang tua	25	30.5	7	8.5	6	7.3	7	8.5	37	45.1	2.71	54.20	Kurang Baik
8	Unit kegiatan siswa di sekolah memungkinkan siswa mengembangkan minat dan bakat yang ada pada dirinya	31	37.8	15	18.3	29	35.4	7	8.5	0	0.00	3.85	77.00	Cukup Baik
9	Jenis tenaga yang ada di sekolah hanya tenaga edukatif.	24	29.3	17	20.7	33	40.2	8	9.8	0	0.00	3.60	72.00	Cukup Baik
10	Persyaratan guru di sekolah sesuai dengan hasil penerimaan seleksi PNS guru.	42	51.2	10	12.2	18	22.0	4	4.9	8	9.8	3.90	78.00	Cukup Baik
11	Jam wajib mengajar guru tidak dibatasi pada 24 jam perminggu	44	53.7	20	24.4	6	7.3	3	3.7	9	11.0	4.06	81.20	Baik
Rata-Rata Total		754	51.08	251	17.01	230	15.58	95	6.44	146	9.89	3.92	78.47	Cukup Baik

Sumber: Data Primer, 2010 (diolah sendiri)

Berdasarkan dari pengolahan data dapat dijelaskan masing-masing sub

variabelnya

- a. Standar penyelenggaraan Pendidikan pada usia sekolah ,dimana sekolah menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang lebih baik, memadai bagi siswa SMP/SMA usia sekolah yang bertujuan untuk peningkatan kualitas siswa nilai ujian nasional yang lebih baik, sekolah tempat yang menyenangkan untuk belajar
- b. Standar pelayanan untuk proses pembelajaran siswa putus sekolah adalah memberikan bimbingan belajar kursus/pelatihan dengan memberikan program pengajaran paket B dan C setara dengan SMP/SMA
- c. Standar kualitas guru dengan memberikan peningkatan SDM guru dengan memperbanyak workshop, pemerataan guru, sertifikasi guru

Hasil jawaban dari masing-masing responden sekolah, dimana pertanyaan dalam koesioner yang berjumlah 11 item pertanyaan dengan kriteria jawaban yang diberikan dapat dilihat dibawah ini

Dari distribusi frekwensi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di atas dapat diketahui bahwa setiap awal tahun ajaran sekolah telah mempersiapkan kelompok wajib usia sekolah SMP/SMA sesuai standar usia sekolah yang telah ditetapkan berdasarkan Kepmendiknas No.129a/U/2004 tanggal 24 Oktober 2004 tentang standar pelayanan minimal pendidikan termasuk penetapan standar usia sekolah yang tertampung pada sekolah negeri dan swasta dalam hal ini terealisasi sebesar 81,7% yang diterima pada sekolah negeri dikarenakan dengan penerimaan siswa baru sistem online berdasarkan nilai siswa ,kemudian materi pengajaran yang disajikan mengacu pada kurikulum yang relevan dengan arti kata 84,1% sekolah telah mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan. Adanya 80,5% sekolah telah menerapkan strategi proses belajar mengajar yang diterapkan disesuaikan dengan materi pelajaran

karena ini adalah salah satu indikator dalam keberhasilan suatu sekolah. Kemudian angka putus sekolah sebesar 1% dari siswa sekolah harus dapat diperkecil dalam rangka penuntasan wajib belajar sebesar 67,1% yang dilaksanakan untuk kualitas peningkatan SDM dengan membekali dengan keterampilan life skill.

Untuk bimbingan belajar siswa di laksanakan dalam lingkungan sekolah, hal ini terbukti bahwa 72,0% sekolah telah membimbing siswanya dilingkungan sekolah dengan harapan lingkungan keluarga juga harus membimbing siswa dimaksud sehingga proses pendidikan anak akan terujud dalam hal ini dilakukan dengan sistem paket. Dalam penerimaan daya tampung sekolah bagi anak usia sekolah persentase 19,5 % melebihi kapasitas ruang belajar dengan pernyataan responden sebesar 19,5 % yang menyatakan sangat setuju dikarenakan keterbatasan lokal yang umumnya sekolah menerapkan sistem satu shief pembelajaran ini disikapi dengan penambahan ruang belajar dengan pembangunan unit penambahan lokal baru tiap tahunnya

Sebagai persyaratan sebagai siswa suatu sekolah, pihak sekolah tidak pernah melihat kepada kemampuan ekonomi orang tua dan dibuktikan jawaban responden sangat setuju sebesar 30,5 % sekolah tidak pernah melakukannya. disebabkan persyaratan siswa sesuai dengan kemampuan siswa . Unit kegiatan siswa di sekolah memungkinkan siswa mengembangkan minat dan bakat yang ada pada dirinya sangat tergantung kepada siswa dengan arti kata 37,8% siswa dapat mengembangkan bakat sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat siswa , pihak sekolah hanya memfasilitasinya untuk menumbuh kembangkan bakat , kadang-kadang siswa dapat mengembangkan bakat yang ada dalam potensi dirinya, hal ini disebabkan unit kegiatan siswa memberikan kesempatan untuk itu.

Jenis tenaga yang ada di sekolah hanya tenaga edukatif karena untuk pendidikan dasar tidak ada tenaga tata usaha (PNS) yang membantu administrasi sekolah, sehingga 29,3 % yang dinyatakan sangat setuju dalam jawaban responden , kadang-kadang guru melaksanakan administrasi sekolah. Persyaratan guru di sekolah sesuai dengan hasil penerimaan seleksi PNS guru, hal ini dikarenakan ketidak mampuan sekolah dalam mengaji guru honor, ini dibuktikan 51,2% sekolah memanfaatkan guru PNS sebagai persyaratan sebagai guru karena telah diseleksi sebelumnya oleh Pemerintah. Jam wajib mengajar guru tidak dibatasi pada 24 jam perminggu karena guru pada pendidikan dasar adalah guru kelas sehingga 53,5% sekolah selalu tidak mewajibkan guru mereka mengajar 24 jam perminggu untuk syarat sertifikasi bagi guru

Selanjutnya berdasarkan skor rata-rata dan tingkat capaian skor maksimum setiap indikator variabel Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Pendidikan Dasar Kota Padang di atas, dapat diungkapkan bahwa distribusi jawaban responden sebagian besar menyatakan selalu dan sering untuk setiap pernyataan atau pertanyaan dalam instrument. Dengan demikian maka secara umum Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Pendidikan Menengah SMP/SMA di Kota Padang termasuk dalam kategori cukup baik dengan tingkat capaian responden 78,47

Data yang lengkap mengenai nilai dari kuisioner dapat dilihat pada lampiran 1 sampai lampiran 6, yang terdiri dari hasil kuisioner praktek yang sehat dalam pelayanan pendidikan, hasil kuisioner penempatan guru/pegawai sesuai kompetensinya, hasil kuisioner standar pelayanan pendidikan usia sekolah pada jenjang sekolah SMP/SMA, hasil kuisioner standar proses pembelajaran bagi siswa putus sekolah dan hasil kuisioner standar kualitas dan guru.

4.1 Deskriptif Persentase (DP) Kualitas Sistem Pengendalian administratif

Sebagai variabel, kualitas pengendalian administratif terdiri dari dua subvariabel, yaitu praktek yang sehat dalam pelayanan dalam pendidikan sebagai subvariabel 1 dan penempatan guru/pegawai sesuai dengan kompetensinya sebagai sub variabel 2. Indeks presentasi yang didapat dapat dilihat pada tabel 4.5 yang diperoleh dengan deskriptif persentase (DP)

Tabel 4.6 Indeks Presentase Variabel – Variabel Penelitian

No	Variabel	Keterangan	Nilai yang diperoleh (Skor empirik)	Indeks Presentasi (%)	Rentang Persentase
	X1	Praktek yang sehat dalam pelayanan Pendidikan	3.80	76.00	Baik
2	X2	Penempatan guru/pegawai sesuai dengan kompetensinya	3.81	76.20	Baik
3	Y1	Standar penyelenggaraan Pendidikan usiasekolah	4.27	85.40	Sangat Baik
4	Y2	Standar proses pembelajaran siswa putus sekolah	4.54	90.80	Sangat Baik
5	Y3	Standar kualitas siswa dan guru	4.07	81.40	Sangat Baik
		Rata-Rata		81,96	

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh tingkat Kualitas pengendalian administratif pada sekolah SMP/SMA di Kota Padang yaitu antara 50,00 % - 75,00 %. Jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan maka rata-rata tingkat kualitas pengendalian administratif pada SMP/SMA di Kota Padang dalam klasifikasi

Baik, ini berarti Kualitas Pengendalian sudah berjalan efektif sebagaimana mestinya dalam rangka untuk pencapaian suatu standar pelayanan minimum Pendidikan di kota Padang

4.2 Hasil Uji Peryaratan Analisis

Analisis regresi dapat dilakukan bila data yang dianalisis memenuhi beberapa persyaratan, yaitu : (1) data berdistribusi normal dan (2) data berasal dari populasi yang homogen. Untuk melihat apakah persyaratan tersebut dapat terpenuhi atau tidak, maka perlu dilakukan uji persyaratan analisis.

a. Uji Normalitas

Dari hasil pengolahan data melalui uji normalitas Kolmogorov- Smirnov diperoleh angka normalitas distribusi data seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov-Smirnov		
	Statistic	Sig.	Keterangan
Kualitas Pengendalian Intern	0.110	0.070	Normal
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum	0.117	0.083	Normal

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel kualitas pengendalian administratif sebesar $0,070 > 0,05$ yang berarti bahwa distribusi frekuensi data variabel kualitas pengendalian administratif adalah normal. Untuk variabel pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum diperoleh angka signifikansi sebesar $0,083 > 0,05$ yang berarti bahwa data variabel pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum berdistribusi normal. Berdasarkan uraian di atas, maka seluruh data yang dikumpulkan pada setiap variabel

penelitian berdistribusi normal. Hal ini berarti bahwa distribusi jawaban responden telah normal sehingga dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian memiliki *varians* yang sama (homogen) atau tidak. Hasil analisis data diperoleh homogenitas data sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Homogenitas Data

No	Variabel Penelitian	Levene Statistic	Df1	Df2	Sig.	Keterangan
1.	Kualitas pengendalian administratif	4.788	25	51	0.515	Homogen

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2010

Hasil analisis di atas terlihat bahwa nilai signifikansi probability pada variabel lebih besar dari 0,05, dengan demikian berarti bahwa data penelitian ini adalah homogen, sehingga dapat dilanjutkan untuk analisis pengujian hipotesis.

4.3 Hasil pengujian Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian , dan untuk menganalisa data dipergunakan analisis regresi dengan menggunakan komputer program SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

4.3.1 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh kualitas pengendalian administratif berpengaruh terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan SMP/SMA di Kota Padang, dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.9 Analisis Regresi Kualitas Pengendalian Administratif terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	T _{Hitung}	T _{Tabel} $\alpha=0,05$	Sig
Kualitas Pengendalian administratif (X)	0,416	7,373	6.603	1,65	0,000
Constanta	= 41,143				
Std. error of Est	= 0,075				
R square	= 0,267				
R	= 0,517				

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2010

Berdasarkan hasil analisis regresi Kualitas pengendalian administratif (X) terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (Y) menghasilkan koefisien arah regresi b sebesar 0,416 untuk X_1 (Kualitas Pengendalian administratif) serta konstanta a sebesar 41,143. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan sebagai berikut : $\hat{Y} = 41,143 + 0,416X_1$

Dari model diatas dapat dilihat nilai konstanta sebesar 41,143, artinya pada kondisi saat ini dengan tingkat kualitas pengendalian administratif konstan, pada Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang menyatakan kecenderungan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum yang meningkat.

Selanjutnya dari model juga dapat dilihat nilai koefisien variabel bebas yang mempunyai nilai koefisien positif, artinya variabel tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum pada sekolah menengah SMP/SMA di Kota Padang.

Model persamaan regresi tersebut mengandung arti bahwa apabila kualitas pengendalian administratif (X_1) ditingkatkan sebesar satu satuan (*ceteris paribus*), maka akan terjadi peningkatan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (Y) sebesar $0,418X_1$ satuan dengan konstanta sebesar 41,145.

Koefisien variabel kualitas pengendalian administratif menunjukkan hubungan positif terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada SMP/SMA Negeri di Kota Padang dengan nilai 0,416 yang berarti peningkatan kualitas pengendalian administratif, maka akan meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum sebesar 0,416. Dengan demikian peningkatan kualitas pengendalian administratif akan meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang.

Namun untuk mengetahui apakah pengaruh variabel bebas tersebut signifikan terhadap variabel terikatnya, dibahas dalam hipotesis T- test.

1. Koefisien Determinasi

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah 0,267 yang menunjukkan bahwa variabel *independent* (Kualitas Pengendalian Administratif) berpengaruh terhadap variabel *dependent* (Pencapaian Standar Pelayanan Minimum). Angka R Square (R^2) sebesar 0,267 yang berarti pengaruh variabel terikat (*Independent*) terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (Y) sebesar 26,7%. Artinya kontribusi Kualitas pengendalian Administratif terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang adalah sebesar 26,7%, sedangkan sisanya sebesar 73,3% dijelaskan oleh sebab lain-sebab lain diluar model penelitian ini.

2. F - test

Pengujian menggunakan uji F dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil pengujian terhadap persamaan Regresi jamak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10 Analisis Hasil Uji F

	JK	DF	Mean Square	F_{hitung}	Sig
Regression	1603,688	1	1603,688	29,482	0,000
Residual	4351,330	80	54,390		
Total	5955,018	81			

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2010

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil uji F memberikan nilai 29,482 dan nilai probability (sig) = 0,000, dengan taraf pengujian (α) 5%, nilai probability tersebut jauh dibawah nilai α_{kot} , maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas Kualitas Pengendalian Administratif (X) mempengaruhi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (Y) pada Pendidikan menengah SMP/SMA di kota Padang. Atau nilai F hitung sebesar 29,482 dengan tingkat signifikansi 0,000, karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka diterima sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh kualitas dari pengendalian adiministratif terhadap pencapaian SPM pendidickan sekolah menengah tersebut

3. T - test

Hipotesis statistik yang digunakan untuk t-test pada variabel Kualitas Pengendalian Administratif (X) :

Ho : Kualitas Pengendalian Administratif tidak berpengaruh terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah SMP/SMA di di Kota Padang

Ha : Kualitas Pengendalian Administratif berpengaruh terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang

Nilai t hitung yang diperoleh untuk Kualitas Pengendalian Administratif adalah sebesar 6.603 dengan probability sebesar 0,000, yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya dari data yang ada terbukti bahwa Kualitas Pengendalian Administratif mempunyai pengaruh terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang pada tingkat signifikansi 5 persen. Dari koefisien regresi untuk variabel Kualitas pengendalian Administratif yang bertanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan Kualitas Pengendalian Administratif terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang, sehingga peningkatan Kualitas Pengendalian Administratif pada pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang akan meningkatkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan .

Hal ini berarti bahwa dengan adanya Kualitas pengendalian administratif, akan meningkatkan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan pada SMP/SMA di kota Padang.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ternyata bahwa hipotesis kerja yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara Kualitas Pengendalian Administratif terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) secara lebih rinci hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kualitas Pengendalian Administratif menjelaskan pengaruh terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pada Pendidikan Menengah SMP/SMA di Kota Padang pada tingkat signifikansi 5 persen. Sehingga peningkatan Kualitas Pengendalian Administratif pada Pendidikan Menengah SMP/SMA di Kota Padang akan meningkatkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Kualitas Pengendalian Administratif diperoleh skor rata-rata total sebesar 3,71 dengan tingkat pencapaian 74,2%, berada pada kriteria cukup baik. Hal ini menjelaskan bahwa Kualitas Pengendalian Administratif dinilai harus lebih ditingkatkan sehingga Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) akan menjadi lebih baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mariana, (2005) Peningkatan kualitas pendidikan menengah SMP/SMA diharapkan menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Di sisi lain, prioritas alokasi pembiayaan pendidikan Menengah SMP/SMA seyogianya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hal pengelolaan administrasi sekolah yang tertata dengan baik dan pelayanan yang prima untuk kemajuan Pendidikan. Dengan pengendalian administratif pengelolaan Pendidikan yang lebih baik dan teratur dapat mengukur Kualitas pelayanan Pendidikan pada SMP/SMA, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi untuk peningkatan kualitas Pendidikan antara lain :

- a. Pelayanan prima terhadap proses pemberian Pendidikan yang bermutu kepada masyarakat
- b. Memahami tugas dan fungsi aparatur Pendidikan untuk peningkatan kinerja Pelayanan Pendidikan
- c. Peningkatan kualitas guru untuk peningkatan Pendidikan
- d. Memperkuat fungsi Pengendalian Intern terhadap pengawasan pengelolaan pendidikan

e. Evaluasi berkala terhadap pengawasan intern yang telah dilaksanakan sekolah

Secara umum sistem pengendalian intern dapat dipahami sebagai suatu proses manajemen yang memungkinkan bekerjanya suatu organisasi dikelola secara baik karena didalamnya terbangun suatu sistem, prosedur dan tata cara dimana satu sama lain atau sendiri-sendiri dapat saling berhubungan. Fungsi-fungsi organisasi harus bekerja secara optimal yang tujuan akhirnya adalah tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok, serta pelaporan dan pertanggungjawaban hasil-hasil yang dicapai memenuhi kriteria akuntabel dan transparan. Efisiensi dan efektifitas indikator minimalnya adalah :Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Adanya perbaikan berkelanjutan. berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi

Dari distribusi penyebaran koefisien sebahagian sekitar 90 % dikembalikan responden yaitu para Kepala Sekolah dan Ka.Tata Usaha dan rata-rata jawaban pertanyaan setuju terhadap variabel yang diteliti, diperoleh tingkat Kualitas pengendalian administratif pada SMP/SMA dikota Padang didapat angka rata-rata 50 %-75 % dengan tingkat persentase klasifikasi Baik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut berarti Kualitas pengendalian administratif sangat diperlukan dan harus diterapkan serta ditingkatkan pelaksanaannya, terutama dalam hal yang menyangkut penganalisaan untuk mengukur adanya kegiatan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikan, kinerja SDM Pendidikan guru/pegawai sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang lebih tepat hingga terwujud usaha yang benar benar efektif dan efisien. Pengendalian Administratif merupakan

sistem yang dibangun melalui organisasi dan mekanisme dalam bekerja memberikan pelayanan Pendidikan, sehingga melekat pada setiap aktivitas yang dijalankan oleh setiap pegawai/guru didalam proses belajar dan mengajar sebagai bentuk pelayanan bagi siswa

Pada sub variabel Praktek yang sehat dalam pelayanan Pendidikan dapat dilihat pihak sekolah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat dengan standar pelayanan minimum yang terbaik Kualitas internal control Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen, yang antara satu elemen dengan elemen lainnya saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Sebagai contoh, kepala sekolah adalah salah satu elemen sekolah. Kepala sekolah akan berhubungan secara timbal balik dengan elemen-elemen lain di sekolah itu. Fungsi dari Pengendalian administratif yaitu berupa berbagai pelaksanaan kegiatan yang bersifat administratif dalam membuat kebijakan yang telah dibuat unsur pimpinan dalam rangka pencapaian suatu standar pelayanan minimal pada bidang Pendidikan yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Pengendalian Administratif terletak pada sumber daya manusianya dalam mengelolah pendidikan tersebut dalam hal ini guru/pegawai sekolah.

Penempatan guru yang sesuai dengan Skill/keahlian dan kompetensinya harus berdasarkan standar yang ditetapkan yaitu harus tenaga guru yang berkualitas. Pengendalian administratif telah ditata administratif dengan baik dan sempurna untuk pemberian pelayanan terbaik dan berkualitas bagi masyarakat, untuk itu perlu partisipasi dan kerjasama yang baik juga dari para stakeholders pendidikan dalam rangka mengujudkan pendidikan yang berkualitas, dengan berbagai langkah dalam membenahan pendidikan terutama untuk mengujudkan kualitas administratif pengendalian yang bermutu

Standar Pelayanan Minimum Pendidikan dilaksanakan untuk pemberian suatu standar pelayanan minimal yang merupakan tolok ukur suatu pelayanan yang dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat dalam bidang Pendidikan terutama untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas, maka perlu pengendalian intern

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ternyata bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kualitas pengendalian intern/administrasi control terhadap standar Pelayanan Minimum pada bidang pendidikan, secara lebih rinci hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut ::

Kualitas pengendalian intern/Administrasi control menjelaskan pengaruh kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pada jenjang pendidikan SMP/SMA dengan tingkat signifikan 5 persen, sehingga peningkatan kualitas pengendalian intern/administrasi control pada jenjang pendidikan SMP/SMA di kota Padang akan meningkatkan kinerja Standar Pelayanan Minimum. Pengukuran Kualitas pengendalian administratif yaitu pada praktek yang sehat dalam pelayanan pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap standar penyelenggaraan pendidikan usia sekolah dan standar proses pembelajaran bagi siswa putus sekolah. Dan penempatan guru/pegawai sesuai dengan kompetensinya berpengaruh positif juga terhadap penyelenggaraan pendidikan pada usia sekolah.

. Dari koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pengendalian Administratif yang bertanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan Kualitas Pengendalian Administratif terhadap Standar Pelayanan Minimum Pendidikan SMP/SMA di Kota Padang, sehingga peningkatan Kualitas Pengendalian Administratif pada pendidikan

Menengah SMP/SMA di Kota Padang akan meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Hasil korelasi diatas diperoleh nilai koefisien korelasi untuk setiap item pada masing – masing variabel lebih besar dari pada $0 > 0,3640$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut “valid”. yang berarti bahwa variabel kualitas pengendalian administratif mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian standar Pelayanan Minimum Pendidikan di Kota Padang

Dengan adanya pengendalian intern sekolah akan dapat mengevaluasi kegiatannya, dengan pengawasan yang efektif, dalam rangka mengujudkan dan meningkatkan kualitas / mutu dari pendidikan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem pengendalian intern terhadap pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan pada Sekolah menengah umum SMP/ SMA di kota Padang, melalui koesioner yang dibagikan kepada kepala-kepala sekolah menengah umum dan Kepala Tata Usaha SMP / SMA di kota Padang dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis atau pengujian adalah menolak H_0 , yang artinya kualitas sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan pada Sekolah menengah umum SMP/ SMA di kota Padang.

Kualitas pengendalian intern pada sekolah SMP/SMA di kota Padang sangat baik dengan rata-rata pencapaian 81,96 % untuk pencapaian Standar pelayanan minimum tersebut.

Kinerja Sekolah akan meningkat dengan adanya sistem pengendalian intern, untuk ketercapaian suatu Standar Pelayanan minimum Pendidikan yang dapat mengakses seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati Pendidikan tersebut

Hasil penelitian dapat dilihat dari masing-masing sub variabel bahwa :

- a. Praktek yang sehat dalam pelayanan Pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap standar penyelenggaraan Pendidikan untuk usia sekolah siswa SMP/SMA di kota Padang

- b. Praktek yang sehat dalam pelayanan Pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap standar proses pembelajaran untuk siswa putus sekolah
- c. Penempatan guru/pegawai sesuai dengan kompetensinya memiliki pengaruh positif terhadap standar kualitas guru tersebut
- d. Standar Pelayanan Minimum Pendidikan dilaksanakan untuk pemberian suatu standar pelayanan minimal yang merupakan tolok ukur suatu pelayanan yang dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat dalam bidang Pendidikan terutama untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas, maka perlu pengendalian intern
- e Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ternyata bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kualitas pengendalian administratif terhadap standar Pelayanan Minimum pada bidang pendidikan,

6.1 Saran-saran

Penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa perlu adanya kualitas sistem pengendalian intern di sekolah-sekolah untuk pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan, karena itu, perlu diterapkan untuk semua sekolah-sekolah menengah SMP/SMA di kota Padang dan juga untuk semua sekolah, yang bertaraf internasional atau SSN.

Agar lebih terprogram dan terkontrol dalam mencapai kualitas Pengendalian Intern, maka diharapkan Pemerintah Depdiknas RI maupun Pemerintah Daerah lebih memperhatikan tentang pendesainan dan

pengimplementasian sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan pedoman dan ketentuan aturan yang berlaku . Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan mutu kinerja manajemen yang profesional.

Referensi dan mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan memasukkan berbagai variabel lain seperti partisipasi masyarakat, efisiensi biaya dan lain-lain untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian standar Pelayanan minimum Pendidikan

Penelitian ini mempunyai kerbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan disarankan agar penelitian selanjutnya hendaknya memberikan paparan yang luas tentang item-item pengungkapan dalam peningkatan standar pelayanan minimal Pendidikan yang dirarahkan kepada kinerja.

Sampel dalam Penelitian ini diambil dengan purposive sampling, pengambilan dengan metode lain diharapkan akan lebih menspesifik hasil penelitian dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, atau dengan kata lain Peneliti berikut dapat melakukan metode penarikan sampel dengan menggunakan metode lain.

Alat ukur yang digunakan untuk pengendalian intern dan pencapaian standar pelayanan minimal hendaknya diperbaharui sesuai dengan kondisi kemajuan zaman dan era teknologi yang maju dalam dunia Pendidikan

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan Adjusted R Square yang rendah walaupun secara statistis signifikan dalam menjelaskan keterkaitannya, oleh karena itu terdapat variabel-variabel yang baru dalam penelitian selanjutnya



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH SMP NEGERI 08 PADANG

Alamat : Jalan Dr.sutomo Padang

Telpon :

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422/SM/UK - 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a

: ANDI DEFRIYAN

Mahasiswa

: Program Pasca Sarjana S2 Akuntansi Pemerintahan
Dan Pengawasan Keuangan Negara

No. BP

: 07 206 086

Alamat

: Komp.Cendana Blok L-24-Tabing Kel.Parupuk
Tabing Kota Padang

Telah melaksanakan penelitian dari bulan Juni S/d Agustus 2010 pada SMPN 08 Padang dengan judul Peneletian " PENGARUH KUALITAS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCAPAIN STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENDIDIKAN PADA SMP/SMA DI KOTA PADANG "

Demikianlah kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya,terima kasih

PADANG, 5 SEPTEMBER 2010

KERALA



ERNAWATI SYAFAR,S.Pd
NIP.19571020 197703 2 002

LAMPIRAN I

HASIL KOESIONER PRAKTEK YANG SEHAT DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR RESPONDEN	NOMOR PERTANYAAN													TOTAL	NILAI RATA-RATA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	SMPN No.01	Responden 1	4	4	3	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	57	4,38
		Responden 2	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	59	4,53
2	SMPN No.02	Responden 3	3	3	4	4	4	5	3	5	4	4	3	5	51	3,92	
		Responden 4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	56	4,31	
3	SMPN No.03	Responden 5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	55	4,23	
		Responden 6	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	57	4,38	
4	SMPN No.04	Responden 7	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	3	4	4	53	4,08
		Responden 8	4	4	4	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	52	4,00
5	SMPN No.05	Responden 9	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	5	48	3,69
		Responden 10	4	4	3	3	4	4	4	3	5	4	4	5	51	3,92	
6	SMPN No.06	Responden 11	4	4	3	3	4	4	4	3	5	4	4	5	53	4,08	
		Responden 12	5	5	4	5	5	3	4	4	4	3	3	4	53	4,08	
7	SMPN No.07	Responden 13	4	4	4	5	5	4	3	4	3	4	4	3	51	3,92	
		Responden 14	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	3	51	3,92	
8	SMPN No.08	Responden 15	4	4	3	3	2	5	5	4	3	4	5	4	4	50	3,85
		Responden 16	4	4	4	4	5	3	3	3	4	4	4	4	4	50	3,85
9	SMPN No.09	Responden 17	3	3	4	4	4	3	4	5	5	4	3	5	3	50	3,85
		Responden 18	4	4	5	5	5	3	3	4	4	4	5	5	5	56	4,31
10	SMPN No.10	Responden 19	2	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47	3,61
		Responden 20	4	4	5	4	4	3	3	4	5	5	5	4	5	55	4,23
1	SMAN No.01	Responden 21	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	4	4	5	50	3,85
		Responden 22	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	5	5	5	54	4,15
SMAN No.02	Responden 23	4	4	3	3	3	4	6	5	5	4	3	4	5	53	3,53	
	Responden 24	4	4	4	4	5	5	5	3	3	3	4	4	5	53	3,53	
SMAN No.03	Responden 25	4	4	3	3	4	3	5	5	4	4	5	5	5	54	4,15	
	Responden 26	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	3	53	3,53	
SMAN No.04	Responden 27	3	3	2	1	4	5	4	5	5	4	4	5	4	49	3,77	
	Responden 28	4	4	5	5	3	4	5	5	1	4	3	3	3	49	3,77	
SMAN No.05	Responden 29	4	4	4	5	5	3	3	2	1	4	4	4	4	47	3,61	
	Responden 30	4	5	5	5	4	3	3	1	5	3	3	5	5	51	3,93	
SMAN No.06	Responden 31	4	5	5	4	3	3	3	2	2	5	4	3	3	46	3,54	
	Responden 32	2	2	4	5	5	4	3	3	1	3	5	4	4	45	3,46	
SMAN No.07	Responden 33	2	1	4	4	4	5	5	2	2	2	3	3	5	42	3,23	
	Responden 34	2	4	4	4	3	3	3	1	1	3	4	4	4	40	3,08	
SMAN No.08	Responden 35	4	5	5	4	3	4	4	3	2	4	4	4	5	51	3,93	
	Responden 36	4	4	5	2	1	3	3	3	3	2	4	5	3	42	3,23	
SMAN No.09	Responden 37	4	3	5	4	4	4	3	5	5	4	4	5	5	55	4,23	
	Responden 38	5	4	4	4	4	5	3	3	3	5	5	4	3	52	4,00	
SMAN No.10	Responden 39	4	3	4	4	5	3	4	4	5	5	4	5	4	54	4,15	
	Responden 40	4	4	4	4	5	3	3	3	5	4	5	5	4	53	4,08	
			153	153	161	157	165	155	154	145	146	161	168	168	170	2048	152,04
			3,83	3,83	4,02	3,92	4,12	3,87	3,85	3,62	3,65	4,02	4,20	4,20	4,25	51,20	3,80

Lampiran 2

HASIL KOESIONER PENEMPATAN GURU/PEGAWAI SESUAI DENGAN KOMPETENSINYA

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR RESPONDEN					Total	NILAI RATA-RATA
			1	2	3	4		
SMPN								
1	SMPN No.01	Responden 1	4	4	5	5	18	4,50
		Responden 2	4	5	4	4	17	4,25
2	SMPN No.02	Responden 3	5	5	4	4	18	4,50
		Responden 4	4	4	5	5	18	4,50
3	SMPN No.03	Responden 5	3	4	4	5	16	4,00
		Responden 6	3	3	4	4	14	3,50
4	SMPN No.04	Responden 7	4	4	5	5	18	4,50
		Responden 8	3	4	4	4	15	3,75
5	SMPN No.05	Responden 9	4	5	5	4	18	4,50
		Responden 10	5	5	5	5	20	5,00
6	SMPN No.06	Responden 11	4	4	4	4	16	4,00
		Responden 12	4	4	4	5	17	4,25
7	SMPN No.07	Responden 13	4	4	5	5	18	4,50
		Responden 14	4	4	4	5	17	4,25
8	SMPN No.08	Responden 15	4	4	4	5	17	4,25
		Responden 16	4	5	5	5	19	4,75
9	SMPN No.09	Responden 17	3	5	4	4	16	4,00
		Responden 18	3	4	4	4	15	3,75
10	SMPN No.10	Responden 19	4	4	4	4	16	4,00
		Responden 20	4	5	5	5	19	4,75
SMAN								
1	SMAN No.01	Responden 21	4	4	4	4	16	4,00
		Responden 22	3	3	5	5	16	4,00
SMAN No.02	Responden 23	4	3	3	5	15	3,75	
	Responden 24	4	4	5	5	18	4,50	
SMAN No.03	Responden 25	3	4	5	4	16	4,00	
	Responden 26	4	4	4	4	16	4,00	
SMAN No.04	Responden 27	4	3	4	4	15	3,75	
	Responden 28	5	5	5	4	19	4,75	
SMAN No.05	Responden 29	3	3	4	5	15	3,75	
	Responden 30	4	5	5	5	19	4,75	
SMAN No.06	Responden 31	4	4	5	5	18	4,50	
	Responden 32	4	5	4	3	16	4,00	
SMAN No.07	Responden 33	4	4	4	5	17	4,25	
	Responden 34	3	2	5	5	15	3,75	
SMAN No.08	Responden 35	4	4	4	4	16	4,00	
	Responden 36	3	3	4	4	14	3,50	
SMAN No.09	Responden 37	5	5	4	5	19	4,75	
	Responden 38	4	4	5	4	17	4,25	
SMAN No.10	Responden 39	5	5	4	5	19	4,75	
	Responden 40	4	3	4	5	16	4,00	
Jumlah			155	163	175	181	674	152,50
Rata-Rata Nilai			3,87	4,07	4,37	4,52	16,85	3,81

LAMPIRAN 3

HASIL KOESIONER STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN
PADA JENJANG SEKOLAH SMP/SMA

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR RESPONDEN					Total	NILAI RATA-RATA
			1	2	3	4		
SMPN								
1	SMPN No.01	Responden 1	4	5	5	4	18	4,50
		Responden 2	4	4	4	5	17	4,25
2	SMPN No.02	Responden 3	5	5	4	5	19	4,75
		Responden 4	4	4	5	5	18	4,50
3	SMPN No.03	Responden 5	4	5	5	5	19	4,75
		Responden 6	4	4	5	5	18	4,50
4	SMPN No.04	Responden 7	5	5	4	5	19	3,80
		Responden 8	4	4	5	5	18	4,50
5	SMPN No.05	Responden 9	4	4	4	5	17	4,25
		Responden 10	4	4	3	3	14	3,50
6	SMPN No.06	Responden 11	4	4	3	4	15	3,15
		Responden 12	4	4	3	3	18	4,50
7	SMPN No.07	Responden 13	2	4	4	5	15	3,75
		Responden 14	4	4	5	4	17	4,25
8	SMPN No.08	Responden 15	5	4	5	5	19	4,75
		Responden 16	4	5	5	5	19	4,75
9	SMPN No.09	Responden 17	4	3	4	4	15	3,75
		Responden 18	5	5	4	4	18	4,50
10	SMPN No.10	Responden 19	4	4	5	5	18	4,50
		Responden 20	5	4	4	4	17	4,25
SMAN								
1	SMAN No.01	Responden 21	5	4	4	3	16	4,00
		Responden 22	5	3	4	4	16	4,00
SMAN No.02	Responden 23	5	4	4	4	17	4,25	
	Responden 24	4	5	4	4	17	4,25	
SMAN No.03	Responden 25	4	5	5	5	19	4,75	
	Responden 26	4	4	5	5	18	4,50	
SMAN No.04	Responden 27	4	4	5	5	18	4,50	
	Responden 28	4	4	3	5	16	4,00	
SMAN No.05	Responden 29	4	4	5	5	18	4,50	
	Responden 30	4	4	5	5	18	4,50	
SMAN No.06	Responden 31	4	4	5	3	16	4,00	
	Responden 32	4	4	4	4	16	4,00	
SMAN No.07	Responden 33	4	5	5	5	19	4,75	
	Responden 34	4	3	3	2	12	3,00	
SMAN No.08	Responden 35	5	4	4	5	18	4,50	
	Responden 36	5	4	5	3	17	4,25	
SMAN No.09	Responden 37	5	4	5	5	19	4,75	
	Responden 38	4	4	5	5	18	4,50	
SMAN No.10	Responden 39	4	3	4	4	15	3,75	
	Responden 40	4	4	4	5	17	4,25	
JUMLAH			169	165	176	178	688	207,85
NILAI RATA-RATA			4,22	4,12	4,40	4,45	17,20	5,19

LAMPIRAN 4

HASIL KOESIONER STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR RESPONDEN	No.Pertanyaan				Total	NILAI RATA-RATA
			1	2	3	4		
SMPN								
1	SMPN No.01	Responden 1	4	4	3	5	16	4,00
		Responden 2	5	4	4	4	17	4,25
2	SMPN No.02	Responden 3	4	5	4	5	18	4,50
		Responden 4	4	4	5	5	18	4,50
3	SMPN No.03	Responden 5	4	3	4	5	16	4,00
		Responden 6	5	5	4	4	18	4,50
4	SMPN No.04	Responden 7	5	5	5	4	19	4,75
		Responden 8	5	5	4	5	19	4,75
5	SMPN No.05	Responden 9	4	4	5	5	18	4,50
		Responden 10	5	5	4	4	18	4,50
6	SMPN No.06	Responden 11	4	4	3	4	15	3,75
		Responden 12	4	4	4	5	17	4,25
7	SMPN No.07	Responden 13	4	3	4	4	15	3,75
		Responden 14	4	4	5	5	18	4,50
8	SMPN No.08	Responden 15	5	3	4	4	16	4,00
		Responden 16	5	5	4	5	19	4,75
9	SMPN No.09	Responden 17	4	4	4	4	16	4,00
		Responden 18	4	4	5	5	18	4,50
10	SMPN No.10	Responden 19	4	4	4	5	17	4,25
		Responden 20	5	5	4	4	18	4,50
SMAN								
1	SMAN No.01	Responden 21	4	4	5	3	16	4,00
		Responden 22	4	4	4	5	17	4,25
SMAN No.02	Responden 23	3	4	4	4	15	3,75	
	Responden 24	5	4	4	5	18	4,50	
SMAN No.03	Responden 25	3	4	5	5	17	4,25	
	Responden 26	5	4	4	4	17	4,25	
SMAN No.04	Responden 27	3	4	5	4	16	4,00	
	Responden 28	5	4	5	3	17	4,25	
SMAN No.05	Responden 29	5	4	5	5	19	4,75	
	Responden 30	4	4	5	3	16	4,00	
SMAN No.06	Responden 31	5	3	3	3	14	3,50	
	Responden 32	3	4	4	4	15	3,75	
SMAN No.07	Responden 33	4	4	5	5	18	4,50	
	Responden 34	4	4	4	3	15	3,75	
SMAN No.08	Responden 35	4	4	5	3	16	4,00	
	Responden 36	4	4	4	3	15	3,75	
SMAN No.09	Responden 37	4	5	5	4	18	4,50	
	Responden 38	4	5	5	5	19	4,75	
SMAN No.10	Responden 39	5	5	4	5	19	4,75	
	Responden 40	5	4	5	4	18	4,50	
J U M L A H			171	166	173	171	681	181,75
RATA-RATA NILAI			4,27	4,15	4,32	4,27	17,02	4,54

LAMPIRAN 5

HASIL KOESIONER STANDAR KUALITAS SISWA DAN GURU

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR RESPONDEN	No.Pertanyaan			Total	NILAI RATA-RATA
			1	2	3		
SMPN							
1	SMPN No.01	Responden 1	5	5	5	15	5,00
		Responden 2	3	4	4	11	3,60
2	SMPN No.02	Responden 3	4	4	5	13	4,33
		Responden 4	4	4	4	12	4,00
3	SMPN No.03	Responden 5	5	5	5	15	5,00
		Responden 6	4	4	4	12	4,00
4	SMPN No.04	Responden 7	4	4	5	13	4,30
		Responden 8	5	5	5	15	5,00
5	SMPN No.05	Responden 9	4	4	5	13	4,33
		Responden 10	5	4	4	13	4,33
6	SMPN No.06	Responden 11	4	4	5	13	4,33
		Responden 12	4	5	5	14	4,67
7	SMPN No.07	Responden 13	4	4	5	13	4,33
		Responden 14	4	5	5	14	4,67
8	SMPN No.08	Responden 15	4	4	4	12	4,00
		Responden 16	4	4	4	12	4,00
9	SMPN No.09	Responden 17	5	4	4	13	4,33
		Responden 18	4	5	4	13	4,33
10	SMPN No.10	Responden 19	4	4	5	13	4,33
		Responden 20	4	4	5	13	4,33
SMAN							
1	SMAN No.01	Responden 21	4	4	4	12	4,00
		Responden 22	4	4	4	12	4,00
SMAN No.02	Responden 23	4	4	4	12	4,00	
	Responden 24	3	3	4	10	3,33	
SMAN No.03	Responden 25	3	3	4	10	3,33	
	Responden 26	4	5	5	14	4,67	
SMAN No.04	Responden 27	4	4	4	12	4,00	
	Responden 28	5	4	3	12	4,00	
SMAN No.05	Responden 29	4	3	3	10	3,33	
	Responden 30	5	4	4	13	4,33	
SMAN No.06	Responden 31	4	4	4	12	4,00	
	Responden 32	4	4	4	12	4,00	
SMAN No.07	Responden 33	2	3	3	8	2,67	
	Responden 34	3	5	3	11	3,67	
SMAN No.08	Responden 35	3	3	3	9	3,00	
	Responden 36	3	2	1	6	2,00	
SMAN No.09	Responden 37	4	4	5	13	4,33	
	Responden 38	4	4	5	13	4,33	
SMAN No.10	Responden 39	5	4	5	14	4,67	
	Responden 40	3	4	5	12	4,00	
J U M L A H			159	161	169	489	208,54
NILAI RATA-RATA			3,97	4,02	4,22	12,23	5,21

Pertanyaan 15	Pearson Correlation	.573	1	.179	156														
	Sig. (2-tailed)	.000		.270	.337														
	N	40	40	40	40														
Pertanyaan 16	Pearson Correlation	.068	179	1	268														
	Sig. (2-tailed)	.675	.270		.095														
	N	40	40	40	40														
Pertanyaan 17	Pearson Correlation	.424	.156	.268	1														
	Sig. (2-tailed)	.446	.337	.095															
	N	40	40	40	40														

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 • Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	40	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedur

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.877	17

Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Y)

		P 1	P 2	P 3	P 4
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.045	.531	.098
	Sig. (2-tailed)		.855	.458	.546
	N	40	40	40	40
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	-.045	1	.498	.434
	Sig. (2-tailed)	.855		.062	.045
	N	40	40	40	40
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.531	.498	1	.845
	Sig. (2-tailed)	.458	.062		.567
	N	40	40	40	40
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.098	.434	.845	1
	Sig. (2-tailed)	.546	.045	.567	
	N	40	40	40	40
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	1	.432	.468	.455
	Sig. (2-tailed)		.150	.301	.737
	N	40	40	40	40
Pertanyaan 6	Pearson Correlation	.432	1	.147	.197
	Sig. (2-tailed)	.150		.364	.222
	N	40	40	40	40
Pertanyaan 7	Pearson Correlation	.468	.147	1	.024
	Sig. (2-tailed)	.301	.364		.885
	N	40	40	40	40

Pertanyaan 8	Pearson Correlation	455	.197	.024	1
	Sig. (2-tailed)	.737	.222	.885	
	N	40	40	40	40
Pertanyaan 9	Pearson Correlation	1	.438	.097	810
	Sig. (2-tailed)		.005	.551	.951
	N	40	40	40	40
Pertanyaan 10	Pearson Correlation	.438	1	.147	.197
	Sig. (2-tailed)	.005		.364	.222
	N	40	40	40	40
Pertanyaan 11	Pearson Correlation	.097	.147	1	.024
	Sig. (2-tailed)	.551	.364		.885
	N	40	40	40	40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	40	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.813	11

LAMPIRAN 8

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov		
	Statistic	Sig.	Keterangan
Kualitas Pengendalian Intern	0.110	0.070	Normal
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum	0.117	0.083	Normal

Tabel 4.4
Hasil Uji Homogenitas Data

No	Variabel Penelitian	Levene Statistic	Df1	Df2	Sig.	Keterangan
1.	Kualitas pengendalian administratif	4.788	25	51	0.515	Homogen

LAMPIRAN 9

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4.5 Analisis Regresi Kualitas Pengendalian Administratif terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	T _{Hitung}	T _{Tabel} $\alpha=0,05$	Sig
Kualitas Pengendalian administratif (X)	0,416	7,373	5,427	1,65	0,000
Constanta	= 41,143				
Std. error of Est	= 0,075				
R square	= 0,267				
R	= 0,517				

Tabel 4.6 Analisis Hasil Uji F

	JK	DF	Mean Square	F _{hitung}	Sig
Regression	1603,688	1	1603,688	29,482	0,000
Residual	4351,330	80	54,390		
Total	5955,018	81			

Tabel 4.7 Analisis Regresi Kualitas Pengendalian Administratif terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	T _{Hitung}	T _{Tabel} $\alpha=0,05$	Sig
Kualitas pengendalian administratif (X)	0,251	3,639	6,603	1,95	0,000
Constanta	= 7,463				
Std. error of Est	= 0,038				
R square	= 0,353				
R	= 0,594				

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Paadang pada tanggal 16 Desember 1967, merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Osman dan Ibu Agusma. Menamatkan Sekolah Dasar (SD) 02 Padang tahun 1981, Sekolah lanjutan Pertama (SMP) Adabiah pada tahun 1984, dan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Negeri I (SMEA) pada tahun 1987. Pada tahun 1993 penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang Tamat tahun 1998. Pada tahun 2007 penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di jurusan Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara Program Pascasarjana universitas Andalas Padang

